AKTIVITAS BAJAK LAUT DI PANTAI BARAT SUMATERA PADA TAHUN 1830-1860

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Munaqasyah Srata Satu (S-1) Sejarah Peradaban Islam

Oleh:

WELDI WIJAYA

NIM: 4422017

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2026

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pantai Barat Sumatra sejak masa lalu selalu menjadi jalur yang sangat penting dalam arus perdagangan Nusantara dan Dunia. Letaknya yang strategis di sepanjang Samudra Hindia menjadikan wilayah ini sebagai jalur pelayaran utama bagi kapal-kapal dari India, Arab, bahkan Eropa. Sejak abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan seperti Pariaman, Padang, Tiku dan Air Bangis dikenal sebagai pusat perdagangan lada, emas, kopi, dan hasil bumi lainnya yang menjadi komoditas berharga di pasar dunia.[1]

Pada abad ke-17 hingga ke-18, jaringan perdagangan di pantai barat Sumatra sudah terkoneksi dengan Aceh di utara dan Banten di barat. Melalui pelabuhan ini, hasil bumi Minangkabau di ekspor ke berbagai kawasan, sementara barang-barang yang masuk seperti kain India, porselen Cina, dan senjata Eropa masuk ke pedalaman Minangkabau. Dengan demikian, pantai barat Sumatra bukan hanya kawasan ekonomi, tetapi juga jembatan peradaban yang mempertemukan berbagai budaya dan agama, termasuk Islam. Di antara pelabuhan-pelabuhan di pantai barat, Padang dan Pariaman menempati posisi paling strategis. Padang sejak tahun 1665, sudah dikuasai oleh Belanda melalui VOC, yang menjadikannya pusat administrasi dan perdagangan di pantai barat Sumatra. Dari sini, Belanda mengontrol ekspor kopi, lada, dan emas Minangkabau. Maka tidak heran jika para

[1] Sartono Kartodirdjo, dkk. Ikhtisar Keadaan Politik Hindi Belanda Tahun 1839-1848. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1973, hal. 84.

sejarawan menyebutkan bahwa Padang menjadi pusat perkembangan kolonial yang sangat penting pada saat itu.[2]

Sementara itu, Pariaman juga memiliki peran penting sebagai pelabuhan niaga. Letaknya yang lebih dekat dengan jalur pedalaman Minangkabau menjadikannya salah satu pintu utama bagi perdagangan lada dan emas.[3] Pada abad ke-18, Pariaman bahkan menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari India, Arab, hingga Eropa. Pariaman juga dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Minangkabau, dengan lahirnya ulama-ulama besar yang berperan penting dalam dakwah.[4]

Kedua pelabuhan ini menjadi saksi persaingan antara kekuatan lokal, pedagang asing, dan kolonial Belanda. Karena posisinya yang vital, Padang dan Pariaman sering menjadi target serangan, baik dari kekuatan lokal yang menolak hegemoni Belanda, maupun dari kelompok bajak laut yang beroperasi di perairan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pantai barat Sumatra bukan hanya ruang perdagangan, tetapi juga tempat perebutan kekuasaan. Letaknya yang strategis menjadikan pantai barat Sumatra bukan hanya wilayah ekonomi, tetapi juga ruang pertemuan budaya dan agama. Masyarakat pesisir hidup dari hasil laut, perdagangan, dan pelayaran, membentuk pola kehidupan yang terbuka terhadap

[2] Gusti Asnan, *Citra dan Identitas Kota Padang Dalam Lintasan Sejarahnya.*Hal.9

[3] Efrianto. N, Jejak Peradaban Masa Lalu di Kota Pariaman, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 2 No. 1 (Juni 2025), hlm. 395

[4] Siti Aisyah, Dinamika Perekonomian Masyarakat Minangkabau: Peluang dan Tantangan Perdagangan di Daerah Rantau Pariaman Abad XIX, Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 10 No. 2 (Jul-Desember 2020, hlm. 166-174

pengaruh luar[5]. Oleh karena itu, sejarah wilayah ini selalu terkait erat dengan laut baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai medan perjuangan.

Dalam catatan belanda mengenai hal ini pada pertengahan abad 19 bahwa pantai Barat Sumatra adalah rawan sekali aktifitas pembajakan mereka menyebut bajak laut dengan sebutan *zeszover* (perompak laut) kolonial sangat menekankan bahwa bajak laut adalah penjahat yang sangat kejam dan mengganggu kestabilan perdangan pada saat itu. Perlawanan masayarakat lokal bukannya tanpa alasan namun kebijakan kolonial di bidang ekonomi membawa perubahan besar terhadap sistem perdagangan lokal. Belanda memonopoli ekspor kopi dan lada, serta memberlakukan sistem perizinan yang ketat untuk setiap kapal yang beroperasi. Pelaut dan pedagang lokal yang sebelumnya bebas berlayar kini harus tunduk pada aturan kolonial. Mereka diwajibkan membayar pajak dan melapor kepada otoritas Belanda di pelabuhan Padang atau Pariaman.

Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pesisir. Banyak pelaut kehilangan pekerjaan dan pedagang lokal terdesak oleh monopoli Eropa. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih menentang kebijakan tersebut dengan tetap berlayar tanpa izin. Dari sinilah muncul kelompok-kelompok pelaut bebas yang kemudian oleh Belanda disebut sebagai bajak laut (zeerovers).

Dalam buku kolonial Belanda yang mencatat perjalanannya menuju selat Malaka pantai barat sumatera yang berjudul Tijdschrift voor Nederlandh Indie,

[5] Rinaldi Ekaputra, "*Hubungan Pantai Barat dengan Daerah Pedalaman"* makalah dalam Seminar Pantai Barat. Sumatra dalam Perspektif Sejarah, BKSNT Padang, 20 Mei 2003.

disebutkan bahwa pembajakan laut di pantai barat Sumatra merupakan masalah serius bagi pemerintahan Hindia-Belanda. Catatan tahun 1835 menyebut:

> ''*die steeds door zeeroof de rust in deze omstreken storen en den handel belemmeren, gade te slaan, en te beletten dat zij geene depredatien op ons grondgebied plegen en ook geenen clandestienen handel, in onze bezittingen drijven".* (yang terus-menerus mengganggu kedamaian di wilayah ini melalui pembajakan dan menghambat perdagangan, dan untuk mencegah mereka melakukan perampasan di wilayah kami dan terlibat dalam perdagangan gelap atas harta benda kami.)[6]

Dengan adanya perlawanan yang keras dari masyarakat lokal maka

> "*Het gouvernement zag zich genoodzaakt meerdere schepen uit te zenden om de zeerovers te achtervolgen*."[7] ("Pemerintah kolonial terpaksa mengirim beberapa kapal untuk memburu para bajak laut.").

Ekspedisi laut Belanda tersebut dilakukan secara rutin di selat Malaka. Tujuannya bukan hanya menangkap bajak laut, tetapi juga memantau aktivitas pelaut yang berlayar tanpa izin. Sebagian besar mereka sebenarnya adalah pedagang antar-nagari atau nelayan yang mempertahankan mata pencaharian.

[6] Twedee Jargang. "*Nederland Indie*" (Batavia:1839) Hlm. 37

[7]Twedee Jargang." *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië"* (Batavia: Landsdrukkerij, 1830), 78

Namun, tindakan mereka dianggap melanggar hukum kolonial karena tidak melalui sistem pelabuhan resmi.

Sementara itu di Tapanuli dan Air Bngis dalam catatan Belanda, dalam buku ‘’Geschiedenis”. Yang tidak di ketahui penerebit dan tahun terbitnya yang membahas kejadian di Pantai Barat Sumatra pada tahun 1831, bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di daerah ini sangat di pengaruhi oleh aktivitas bajak laut.

> ‘’*De wateren van Tapanolie en Aijerbangies werden door de Atjinsche zeeroovers zoo onveilig gemaakt, dat geen eerlijk handelaar zich daar wagen durfde”.*[8] (Perairan Tapanuli dan Airbangis dibuat sangat tidak aman oleh perompak Aceh, sehingga tidak ada pedagang jujur yang berani pergi ke sana.)

Hal tersebut menekan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Padahal, bagi masyarakat setempat, laut bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi bagian dari identitas sosial dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka memandang laut sebagai milik bersama, bukan wilayah kekuasaan negara atau individu tertentu.

Masyarakat lokal yang terekam melalui naskah dan tradisi lisan, bajak laut tidak selalu dipandang sebagai penjahat laut. Dalam beberapa hikayat, mereka justru digambarkan sebagai pelaut pemberani yang menjaga kehormatan nagari dan melindungi rakyat dari ketamakan pedagang asing maupun penindasan. Bajak

[8] F. Bleeker. Hal 216

laut yang terkenal pada saat itu di pimpin oleh sidi mara Bagi penjajah Belanda, Sidi Mara adalah seorang bajak laut yang paling dicari. Sementara itu, bagi rakyat pantai barat sumatra, Sidi Mara adalah seorang pahlawa[9], sembari masyarakat berkata "maka orang laut itulah yang menegakkan marwah negeri, tiadalah ia merompak melainkan pada orang zalim yang merampas hasil rakyat".

Ungkapan ini menunjukkan bahwa tindakan para pelaut tersebut memiliki dasar moral dan sosial. Mereka dianggap pahlawan laut yang menegakkan keadilan menurut ukuran masyarakat Islam pesisir. Nilai-nilai seperti keberanian, amanah, dan keadilan merupakan unsur penting dalam budaya Melayu-Islam, yang berpadu dengan ajaran Al-Qur'an tentang amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan kebaikan dan melawan kezaliman). Oleh sebab itu, istilah "bajak laut" dalam perspektif lokal bukan sekadar menunjuk pada pelanggaran hukum, tetapi simbol dari perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan di laut.

> *Doen De zeeroof in den Indischen Archipel had in de eerste jaren na veertig eene vroeger ongekende hoogte en uit-breiding erlangd. Van oudsher is die eene plaag voor de koopvaardijvaart geweest. Hij wordt ongemeen begun stigd door het voor een deel zeer moeijelijke vaarwater met zijne tallooze klippen en eilandengroepen, die niet alleen den piraten veilige schuilhocken aanbieden, maar ook het naderen van grooter bodems volstrekt niet toe-staan. Zelfs de door de Hollanders tot bewaking hunner*

[9] Alih aksara oleh Pinto Anugrah, Hikayat Sidi Mara: Bajak Laut dari Pantai Barat Sumatra, Padang: Yayasan Budaya Nusantara, 2008), hlm. 53

kusten op vele stations onderhouden booten met hare achtponders hebben veel te veel diepgang en zijn al te plomp gebouwd, om de windsnelle scheepjes der inboor-lingen met vrucht te kunnen vervolgen. Daarbij komt, dat de laatsten, doorgaans zeer aan den opium verslaafd, hun leven met mohamedaansch fatalismus luttel achten, het om de geringste winst, al is 't maar de schedel van een vijand, op het spel zetten en dus bij den aanval met ecne woede en onstuimiglheid te werk gaan, die alleen genoeg zijn, om hun in vele gevallen de overwinning te verzekeren. Hebben zij het echter met de den European[10]

Teks itu menjelaskan bahwa perompakan di Kepulauan Hindia (termasuk wilayah Nusantara) meningkat pesat setelah tahun 1840-an atau setelah padri. Sejak lama kegiatan itu sudah menjadi ancaman bagi pelayaran dagang, terutama karena kondisi perairan yang sulit, penuh pulau dan karang, yang memudahkan para perompak bersembunyi.

Kapal-kapal Belanda yang ditugaskan menjaga pantai tidak efektif karena terlalu besar dan lambat dibandingkan perahu-perahu cepat milik penduduk lokal. Para perompak pribumi digambarkan sebagai pemberani dan nekat, didorong oleh kecanduan opium dan pandangan fatalistis yang dikaitkan dengan ajaran Islam, sehingga mereka tidak takut mati dan menyerang dengan keganasan yang sering membuat mereka menang melawan kapal-kapal Eropa.

[10] .De Huisvriend Hal. 385

Sumber tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pembajakan di Kepulauan Hindia, termasuk wilayah pantai barat Sumatra, mengalami peningkatan yang signifikan setelah dekade 1840-an. Aktivitas ini pada dasarnya telah menjadi ancaman lama bagi jalur pelayaran dan perdagangan, terutama karena karakteristik perairan Nusantara yang kompleks: dipenuhi gugusan pulau kecil, karang dangkal, serta selat-selat sempit yang memberikan keuntungan operasional bagi kelompok-kelompok perompak. Kondisi geografis tersebut memudahkan mereka melakukan penyergapan terhadap kapal dagang maupun kapal patroli, sekaligus menyediakan lokasi persembunyian yang sulit dijangkau oleh otoritas kolonial.

Jadi penting untuk kita bahwa kajian mengenai bajak laut di Pantai Barat Sumatera belum banyak mendapat perhatian dalam penulisan sejarah Indonesia, terutama dari perspektif masyarakat lokal. Selama ini, sumber-sumber kolonial Belanda mendominasi narasi tentang bajak laut, dengan menggambarkan mereka sebagai pengacau dan penghambat jalannya perdagangan. Padahal, jika dilihat dari kacamata masyarakat lokal dan nilai-nilai Islam yang hidup di pesisir Sumatera Barat, aktivitas bajak laut tidak semata-mata tindakan kriminal, melainkan juga bentuk perlawanan terhadap hegemoni ekonomi dan politik kolonial.

Dokumen kolonial menyoroti bahwa kapal-kapal pemerintah Belanda yang ditempatkan untuk mengamankan wilayah pantai sering kali tidak efektif. Kapal-kapal tersebut umumnya berukuran besar dan memiliki kemampuan manuver yang terbatas, sehingga tidak mampu mengejar perahu-perahu kecil dan cepat

yang digunakan oleh para pelaku pembajakan lokal. Oleh karena itu, perbedaan teknologi, ukuran kapal, serta kecepatan menjadi salah satu faktor utama mengapa pembajakan tetap berlangsung dan sulit diberantas selama periode tersebut.

Kajian ini menjadi penting untuk membuka ruang baru dalam historiografi Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara laut, Islam, dan perlawanan lokal terhadap kolonialisme. Dengan menelusuri pandangan kolonial dan pandangan masyarakat lokal terhadap bajak laut, penelitian ini berusaha menyeimbangkan dua narasi sejarah yang selama ini timpang. Melalui pendekatan historiografi dan analisis sumber lokal seperti hikayat, naskah Melayu, serta tradisi lisan, diharapkan penelitian ini mampu mengungkap bagaimana nilai-nilai keislaman, solidaritas sosial, dan semangat marwah nagari membentuk identitas bajak laut di Pantai Barat Sumatera pada abad ke-19.

Maka dengan itu penelitian ini saya beri judul "Aktivitas *Bajak Laut di Pantai Barat Sumatera Pada Tahun 1830-1860"*

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pantai Barat Sumatra pada abad ke-19 merupakan wilayah strategis perdagangan sekaligus arena perebutan kekuasaan yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi kolonial Belanda, kondisi geografis perairan yang kompleks, serta dinamika sosial-keagamaan masyarakat pesisir. Penerapan monopoli dagang dan sistem perizinan pelayaran yang ketat mendorong munculnya pelayaran tanpa izin yang oleh pemerintah kolonial dilabeli sebagai pembajakan, sementara dalam

perspektif lokal dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya mempertahankan marwah nagari. Perbedaan cara pandang antara sumber kolonial dan masyarakat setempat, serta keterbatasan strategi dan sarana patroli Belanda dalam mengamankan perairan, menimbulkan persoalan historis yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aktivitas bajak laut, faktor-faktor penyebab kemunculannya, serta strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada tahun 1830–1860.

1. Rumusan Masalah

   a.Bagaimana Pantai Barat Sumatra dan Asal Mula Penamaan Bajak Laut Oleh Kolonial Belanda di Pantai Barat Sumatra

   b. Apa Saja Bentuk Bentuk Aktivitas Bajak Laut di Pantai Barat Sumatra

   c. Apa Saja Faktor-Faktor Kemunculan Bajak Laut di Pantai Barat Sumatra dan Bagaimana Strategi Belanda Dalam Menghadapi Bajak Laut di Pantai Barat Sumatra

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan latar belakang, penulis menemukan tiga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

   a. Batasan Tematik

      Penelitian ini secara khusus membahas aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatera, strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menangani aktivitas tersebut, serta dampak dari aktivitas

dan strategi tersebut terhadap kondisi keamanan maritim dan masyarakat pesisir pada masa penelitian.

b. Batasan spasial

Wilayah kajian difokuskan pada kawasan Pantai Barat Sumatera, terutama daerah Padang, Pariaman, dan Air Bangis, yang dalam sumber kolonial disebut sebagai wilayah dengan tingkat aktivitas pembajakan paling menonjol pada periode tersebut.

c. Batasan Temporal

Penelitian ini mencakup rentang waktu pada tahun 1830-1860, yaitu masa pasca-Perang Padri ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai menguat di pesisir Sumatera Barat dan aktivitas pembajakan laut dicatat meningkat dalam laporan resmi pemerintah kolonial.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, peneliti menyimpulkan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatera pada Pertengahan Abad ke 19, termasuk bentuk-bentuk serangan, pola gerakan, wilayah operasi, serta faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas tersebut meningkat

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatera, sebagaimana tercatat dalam arsip, laporan resmi, dan publikasi kolonial pada periode tersebut.

3. Untuk mengkaji dampak dari aktivitas bajak laut serta strategi penanganan kolonial terhadap kondisi keamanan maritim, perdagangan, dan kehidupan masyarakat pesisir di Pantai Barat Sumatera.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencantumkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu.

1. Manfaat penelitian

   a. Akademik

      Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah historiografi Indonesia, khususnya dalam kajian sejarah maritim dan bajak laut di Sumatera Barat.

   b. Non akademik

      Hasil penelitian dapat menumbuhkan kesadaran sejarah bagi masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya laut sebagai bagian dari identitas dan perlawanan bangsa.

2. Manfaat Penelitian untuk pribadi

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi S1 di Program Studi Sejarah Peradaban Islam, serta sebagai sarana mengasah kemampuan analisis sejarah dengan pendekatan lokal dan Islam dan menjawab pertanyaan yang selama ini menjanggal dalam kepala saya apa ia nggak ada bajak laut di pantai barat Sumatra pada masa dulu.

E. Tinjauan Pustaka/ Kepustakaan

Kajian mengenai bajak laut di kawasan Asia Tenggara telah menjadi perhatian para sejarawan sejak abad ke-20. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih didominasi oleh pandangan kolonial yang menggambarkan bajak laut sebagai pelaku kejahatan dan pengacau perdagangan di laut. Dalam konteks ini, sejarah bajak laut sering Kali ditulis dari sudut pandang kekuasaan kolonial yang menekankan aspek keamanan, ekonomi, dan hukum, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang melatarbelakanginya.[11] Padahal, dalam masyarakat maritim tradisional, aktivitas yang disebut "pembajakan" sering kali memiliki makna yang lebih kompleks—kadang sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi atau bentuk pertahanan diri terhadap dominasi asing.[12]

[11] Budiawan, Bajak Laut di Asia Tenggara Abad 16 – 19 Evolusi dan Pola-Poalnya. Jurnal: Ilmu Budaya, Vol. 13 No. 1 (2025) , hlm. 53

[12] *Ibid.* Hlm. 55

Anthony Reid dalam karya klasiknya Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680 (1988) menyebut bahwa laut di Asia Tenggara merupakan ruang ekonomi yang sangat dinamis. Reid menekankan bahwa pembajakan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas perdagangan dan migrasi masyarakat pesisir yang hidup bergantung pada laut. Dalam konteks ini, "bajak laut" bukan hanya penjahat laut, tetapi juga pelaut yang mempertahankan kebebasan berlayar dan hak atas laut dari monopoli kekuasaan asing. Reid bahkan menyebut bahwa sistem perdagangan maritim di kawasan ini telah memiliki jaringan ekonomi sendiri jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa.[13]

Sementara itu, J.C. van Leur dalam Indonesian Trade and Society (1955) melihat fenomena bajak laut dari perspektif ekonomi-historis. Menurutnya, kedatangan bangsa Eropa mengubah keseimbangan ekonomi maritim di Asia Tenggara. Sistem monopoli yang diberlakukan oleh kolonial Belanda melalui VOC tidak membuat pelaut lokal kehilangan peran sebagai pedagang bebas. Namun mengakibatkan, sebagian masyarakat pesisir yang sebelumnya berlayar secara independen kemudian dikategorikan sebagai bajak laut oleh pemerintah kolonial. Pandangan van Leur ini penting karena menunjukkan bahwa istilah "bajak laut" adalah konstruksi sosial yang lahir dari benturan antara sistem perdagangan lokal dan kebijakan kolonial.[14]

[13] Anthony Reid "*Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 (Volume I: Tanah di Bawah Angin)"* Diterjemahkan oleh: Mochtar Pabotinggi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014). hlm 33-37

[14] Singgih Tri Sulistiyono. Historiografi Maritim Indonesia: Prospeknya dan Tantangan. Hlm 5

Kajian yang lebih berorientasi lokal dapat ditemukan dalam karya A.B. Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX (2011). Lapian menegaskan bahwa bajak laut tidak selalu identik dengan kriminalitas, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat laut. Ia membedakan antara "orang laut" (sea people) dan "bajak laut" (pirates) dengan menekankan bahwa istilah kedua lebih banyak digunakan oleh pihak kolonial untuk menstigmatisasi kelompok maritim yang tidak tunduk pada kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, Lapian melihat bajak laut sebagai simbol kemandirian dan perlawanan terhadap kolonialisme.

Selain Lapian, James Francis Warren dalam The Sulu Zone, 1768–1898 (2007) menyoroti jaringan perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara bagian utara, khususnya di wilayah Filipina Selatan dan Kalimantan Utara. Ia menggambarkan bagaimana aktivitas bajak laut atau lanun di wilayah tersebut memiliki struktur ekonomi sendiri dan sering kali terhubung dengan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sulu dan Brunei. Warren menunjukkan bahwa pembajakan di Asia Tenggara bukanlah tindakan acak, melainkan bagian dari ekonomi politik kawasan yang terintegrasi dengan sistem perdagangan dunia.[15]

Dalam konteks Sumatera, beberapa penelitian memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dinamika maritim dan aktivitas bajak laut. Gusti Asnan dalam Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera (2018) menjelaskan bahwa pantai barat Sumatera telah lama menjadi jalur perdagangan internasional sejak

[15] Heru Mulyanto. Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut : Teori Adrian Bernard Lapian Dalam Pola Masyarakat Maritim Kerjaan Sriwijaya. Paradigma: Jurnal Kajian Budaya. Vol. 15 No. 1 (2025). Hlm. 62-64

masa Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Padang, Pariaman, Tiku, dan Air Bangis berfungsi sebagai simpul perdagangan antara pedalaman Minangkabau dengan dunia luar. Menurut Asnan, kehadiran kolonial Belanda di wilayah ini membawa perubahan besar dalam sistem pelayaran dan perdagangan. Monopoli kolonial meminggirkan peran pedagang lokal, sehingga mendorong munculnya perlawanan dalam bentuk pembajakan atau pelayaran tanpa izin. Dengan demikian, fenomena bajak laut di pantai barat Sumatera tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi dan politik kolonial.[16]

Azyumardi Azra dalam karyanya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII juga memberikan pandangan penting mengenai hubungan antara Islam dan dunia maritim. Ia menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui jalur perdagangan laut. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran agama dan nilai-nilai moral Islam.[17] Dalam konteks ini, masyarakat pesisir di Sumatera Barat membentuk identitas Islam yang kuat, yang kemudian mempengaruhi cara pandang mereka terhadap tindakan perlawanan, termasuk terhadap kolonialisme. Aktivitas bajak laut, dalam kerangka ini, bisa dipahami bukan hanya sebagai bentuk ekonomi semata, tetapi juga sebagai ekspresi moral melawan ketidakadilan.

[16].Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera* (Padang: Penerbi : Ombak 2018), hlm. 17-20

[17] Azyumardi Azra, "*Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVII Akar Pembaruan Islam Indonesia*", (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 23-25

Pandangan serupa juga muncul dalam penelitian Taufik Abdullah tentang Islam dan masyarakat Minangkabau. Ia menyebut bahwa identitas keislaman masyarakat pesisir sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tindakan yang dalam catatan kolonial disebut sebagai pembajakan, dalam pandangan lokal justru bisa dipahami sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, yakni upaya menegakkan keadilan dan menentang kezaliman kolonial.[18]

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua arus besar dalam penulisan sejarah bajak laut di Asia Tenggara dan Sumatera. Pertama, arus kolonial dan Barat, yang menekankan pada aspek kriminalitas, keamanan, dan ekonomi kolonial. Kedua, arus lokal dan Islam, yang menempatkan bajak laut sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat maritim dan simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.

Namun, kajian yang secara khusus meneliti bajak laut di Pantai Barat Sumatera tahun 1830–1860 dalam dua perspektif ini masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kawasan timur Nusantara, seperti Laut Sulawesi dan Sulu, sedangkan pantai barat Sumatera belum banyak mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri bagaimana aktivitas bajak laut di pantai barat Sumatera dipahami secara berbeda oleh pihak kolonial dan masyarakat lokal Melayu-Islam.

[18] Taufik Abdullah, "*Islam, Sejarah, dan Perubahan Sosial di Minangkabau*, Hlm.141

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan gabungan antara dua tradisi historiografi: tradisi kolonial yang berbasis arsip dan laporan resmi Belanda, serta tradisi lokal yang terekam dalam hikayat, naskah Melayu

.Melalui pendekatan historiografi kritis dan teori konflik sosial, penelitian ini berusaha membangun pemahaman baru tentang bajak laut sebagai fenomena historis yang tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga dengan identitas, kekuasaan, dan nilai-nilai Islam yang hidup di tengah masyarakat Pantai Barat Sumatera pada abad ke-19.

F. Kerangka Teoritis

Dalam kajian ini peneliti mengggunakan teori yang menekankan bahwa arsip kolonial tidak boleh dibaca sebagai catatan objektif. Arsip adalah produk birokrasi kolonial yang sarat kepentingan politik, sentimentalitas, dan kecemasan kekuasaan. Dokumen kolonial menyimpan bias serta cara berpikir pemerintah kolonial, bukan hanya peristiwa yang terjadi

Dalam penelitian ini, teori Stoler digunakan untuk membaca sumber primer seperti *Sumatra's Westkust*, *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, De *Sumatra-Courant*, serta berbagai laporan militer Belanda. Laporan-laporan tentang "serangan bajak laut", "kapal dirampas", "penduduk melaut tanpa izin", dan "perairan berbahaya" dipahami sebagai teks kolonial yang ditulis untuk memperkuat legitimasi strategi keamanan Belanda.[19]

[19]Artikel. Ann Laura Stoler, "*Colonial Archives and the Arts of Governance*" (Archival Science 2, 2002, hlm. 87–109).l

Pendekatan Stoler memungkinkan penelitian ini mengurai bagaimana laporan kolonial merekam tidak hanya aktivitas bajak laut, tetapi juga strategi Belanda—seperti peningkatan patroli, penggunaan kapal cepat, dan penetapan izin pelayaran. Dengan "membaca arsip melawan arus", penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana persepsi kolonial terhadap ancaman maritim membentuk kebijakan politik dan militer

memperkuat pembacaan non-kolonial, penelitian ini menggunakan teori dekolonisasi sebagaimana dikembangkan oleh Frantz Fanon. Fanon, melalui The Wretched of the Earth (1961), menjelaskan bahwa kolonialisme menciptakan struktur kekerasan yang merampas ruang hidup masyarakat terjajah. Dekolonisasi, bagi Fanon, bukan hanya pembebasan fisik, tetapi juga pembebasan mental dari definisi-definisi kolonial.

Dekolonisasi dalam konteks penelitian ini berarti membaca ulang istilah "bajak laut", "pengganggu pelayaran", atau "perompak" dalam arsip Belanda dengan perspektif masyarakat pesisir. Aktivitas melaut, berdagang, atau mempertahankan jalur pelayaran lokal, yang dalam arsip kolonial dicap sebagai tindakan kriminal, dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap pembatasan ruang hidup dan monopoli kolonial atas laut dan perlawanan orang-orang terjajah terhadap dominasi penjajahan.[20]

Dengan teori dekolonisasi, penelitian ini berupaya mengembalikan makna aktivitas bajak laut sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat pesisir, bukan semata tindakan kriminal. Dekolonisasi membantu menunjukkan bahwa

[20] Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth, terj. Richard Philcox (*New York: Grove Press, 2004), 37-50.

pembajakan yang dicatat Belanda sering kali merupakan ekspresi penolakan terhadap dominasi kolonial, penindasan ekonomi, dan kontrol atas jalur maritim yang sebelumnya merupakan ruang kebebasan masyarakat pesisir. Melalui pendekatan ini, aktivitas bajak laut dapat dibaca sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan maritim dan identitas budaya masyarakat lokal.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historis) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipakai karena penelitian ini membahas peristiwa masa lalu, yaitu tentang aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatera pada tahun 1830–1860, serta bagaimana pandangan kolonial dan masyarakat lokal terhadap peristiwa tersebut.

Metode sejarah dipilih agar peneliti bisa menelusuri fakta-fakta masa lalu secara lebih mendalam dan memahami hubungan antar peristiwa. Melalui metode ini, peneliti berusaha menemukan sumber, menguji kebenarannya, menafsirkan maknanya, lalu menuliskannya kembali menjadi sebuah cerita sejarah yang utuh dan bermakna.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, artinya penelitian ini tidak memakai angka atau data statistik, tetapi berfokus pada penjelasan dan pemahaman terhadap suatu peristiwa. Penelitian ini juga menggunakan metode historis, yaitu cara kerja yang digunakan dalam penelitian sejarah untuk menelusuri dan menafsirkan peristiwa masa lalu secara sistematis. Penelitian sejarah biasanya dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap ini merupakan proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

A. Sumber Primer.

Sumber primer adalah sumber asli yang berasal langsung dari masa terjadinya peristiwa yang diteliti dan memberikan kesaksian sezaman mengenai aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada pertengahan abad 19. Dalam penelitian ini, sumber primer diperoleh dari arsip kolonial Belanda, laporan administrasi pemerintahan Hindia Belanda, surat kabar kolonial, memoar pejabat kolonial, serta laporan pengamat Eropa yang secara langsung mencatat kondisi perairan dan pelayaran di Sumatra pada pertengahan abad ke-19.

Ada beberapa sumber yang penulis gunakan untuk penelitian ini penelitian ini *yang pertama* Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, yang memuat laporan resmi pemerintah kolonial mengenai keamanan laut, aktivitas zeeroof (pembajakan), patroli laut, serta tindakan penindakan terhadap pelaut pribumi di sekitar wilayah Padang, Pariaman, dan Air Bangis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan surat kabar kolonial untuk *sumber yang ke dua* yakni De Sumatra-Courant sebagai memberitakan peristiwa-peristiwa gangguan keamanan pelayaran dan perkembangan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pembajakan laut.

Yang ke tiga Vogelsang, Herinneringen uit den levensloop van een Indisch' ambtenaar (1856), memoar pejabat kolonial dari tahun 1815-1851 yang berisi catatan pengalaman langsung mengenai pengawasan pelayaran pribumi, pemeriksaan kapal, serta praktik pelayaran tanpa izin yang oleh pemerintah kolonial dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. *Yang ke empat*, majalah kolonial De Huisvriend (1852) digunakan untuk melihat aktivitas perdagangan dan kehidupan masyarakat pesisir serta dampak kebijakan kolonial terhadap nelayan dan pelaut lokal.

Dengan menggunakan sumber-sumber primer tersebut, penelitian ini merekonstruksi secara langsung bagaimana aktivitas bajak laut, strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi pembajakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Pantai Barat Sumatra pada pertengahan abad ke-19.

B. Sumber Sekunder

Selain menggunakan sumber primer, penelitian ini juga didukung oleh sejumlah sumber sekunder berupa buku dan karya ilmiah yang relevan dengan kajian sejarah maritim, bajak laut, kolonialisme, dan Islamisasi di Nusantara. Salah satu rujukan utama adalah karya Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680, yang menjelaskan dinamika perdagangan maritim Asia Tenggara, peran pelaut, serta konflik di jalur-jalur pelayaran internasional. Karya Reid ini memberikan landasan penting untuk memahami posisi strategis Sumatra dalam jaringan perdagangan Samudra Hindia. Selain itu, bukunya yang

berjudul An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra juga digunakan untuk memperkuat konteks sejarah Sumatra sebagai wilayah perbatasan yang sarat dengan konflik ekonomi dan kolonial.

Kajian tentang bajak laut di Nusantara secara khusus banyak merujuk pada karya A.B. Lapian, terutama buku Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Meskipun fokus wilayahnya bukan Pantai Barat Sumatra, buku ini sangat penting secara konseptual karena menjelaskan karakteristik bajak laut, hubungan mereka dengan penguasa lokal, serta konflik dengan pemerintah kolonial. Selain itu, Lapian juga menulis Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17, yang digunakan untuk melihat latar historis dunia pelayaran Nusantara sebelum memasuki abad ke-19.

Kajian yang lebih spesifik mengenai Pantai Barat Sumatra banyak merujuk pada karya Gusti Asnan, khususnya Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra. Buku ini membahas secara mendalam aktivitas perdagangan, pelayaran, peran pelabuhan Padang dan Pariaman, serta dampak kebijakan kolonial terhadap masyarakat pesisir. Karya ini menjadi sumber penting untuk menghubungkan aktivitas bajak laut dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Pantai Barat Sumatra. Selain itu, Asnan juga membahas periode kolonial dalam karyanya tentang Sumatra Barat pada masa kolonial, yang membantu memahami konteks politik pasca-Perang Padri.

Untuk memperkaya perspektif tentang bajak laut sebagai bagian dari sistem ekonomi dan perlawanan maritim, penelitian ini juga

menggunakan karya James Warren, terutama The Sulu Zone, 1768–1898 dan Iranun and Balangingi: Globalization, Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity. Kedua karya ini menunjukkan bahwa pembajakan laut di Asia Tenggara bukan semata tindakan kriminal, melainkan juga berkaitan dengan jaringan perdagangan, perbudakan, serta resistensi terhadap dominasi kolonial. Pemikiran Warren digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memahami fenomena bajak laut di Pantai Barat Sumatra.

Sementara itu, keterkaitan antara laut dan penyebaran Islam dalam penelitian ini diperkuat melalui karya Azyumardi Azra, terutama Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII serta Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Karya-karya ini digunakan untuk menjelaskan bahwa jalur perdagangan laut bukan hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga jalur penting dalam proses Islamisasi di wilayah Nusantara, termasuk kawasan pesisir Sumatra. Dengan demikian, sumber-sumber sekunder tersebut membantu memperkuat analisis tentang hubungan antara aktivitas maritim, kolonialisme, dan Islam dalam penelitian ini.

2. Kritik sumber

   Setelah sumber dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menilai keaslian dan kebenarannya. Kritik yang dilakukan ada dua jenis yaitu yang pertama kritk ekstern untuk memastikan sumber itu asli dan

dapat didipercaya. [21]Dan yang kedua kritik intern untuk menilai isi sumber, melihat apakah ada keberpihakan atau bias, terutama pada sumber kolonial yang sering menggambarkan pelaut lokal sebagai bajak laut.

3. Interpretasi

   Tahap ini dilakukan dengan menghubungkan berbagai sumber yang sudah dikumpulkan agar ditemukan makna yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan aktivitas bajak laut sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat pesisir dengan memakai teori dekolonisasi budaya dan teori konflik sosial.

4. Historiografi

   Tahap terakhir adalah menulis hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah disusun menjadi cerita yang runtut, logis, dan mudah dipahami, serta menampilkan pandangan dari dua sisi: kolonial dan masyarakat lokal.

H. Sistematika penulisan

Bab I: Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai aktivitas

[21] Kuntowijoyo, " *Metedologi Sejarah*", (Yogyakarkarta: Tiara Wacana, 2003), hlm 3-20.

bajak laut di Pantai Barat Sumatera, ruang lingkup penelitian, serta teori-teori yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan arah dan tujuan penelitian agar pembahasan di bab berikutnya lebih terarah.

Bab II: Aktivitas Bajak Laut pada tahun 1830-1860 serta bentuk-bentuk aktivitas bajak laut yang muncul berdasarkan sumber kolonial.

Bab III : Hal apa saja yang menyebabkan terjadinya aktifitas Bajak laut di pantai Barat sumatera pada tahun 1830-1860

Bab IV: Bagaimana strategi Pemerintah Kolonial Belanda dalam Menghadapi Bajak Laut Menguraikan berbagai strategi yang digunakan Belanda, baik secara militer, hukum, maupun administratif, serta dampaknya terhadap kontrol wilayah pesisir dan aktivitas perdagangan.

Bab V : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian mengenai bagaimana aktivitas bajak laut memengaruhi dinamika maritim di Pantai Barat Sumatera dan bagaimana perbedaan pandangan antara kolonial dan masyarakat lokal terbentuk. Saran diberikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian tentang sejarah maritim dan dekolonisasi penulisan sejarah di Indonesia

BAB II

PANTAI BARAT SUMATERA DAN ASAL MULA PENAMAAN BAJAK LAUT OLEH KOLONIAL BELANDA

A. Geografis Pantai Barat Sumatera

Pantai Barat Sumatera merupakan kawasan pesisir Pulau Sumatra yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Secara geografis dan historis, wilayah ini tidak identik dengan Provinsi Sumatera Barat masa kini. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menyebut kawasan ini sebagai Sumatra's Westkust, yang meliputi Padang Bovenlanden (Padang Darat), Padang Benedenlanden (Padang Pesisir), Kepulauan Mentawai, serta Tapanuli, meskipun wilayah administratif Sumatera Barat modern tidak mencakup seluruh kawasan tersebut.[22]

Secara fisiografis, Pantai Barat Sumatera ditandai oleh jalur pesisir yang sempit, diapit langsung oleh Pegunungan Bukit Barisan di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar permukiman dan bandar perdagangan berkembang di muara sungai, teluk kecil, dan dataran pantai yang relatif terbatas.[23] Jalur sungai yang berhulu di Bukit Barisan berfungsi sebagai penghubung utama antara daerah pedalaman dan pesisir, sehingga memperkuat peran pantai barat sebagai pintu keluar hasil bumi Minangkabau dan wilayah pedalaman lainnya.[24]

[22] Sartono Kartodirdjo, skk. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindi Belanda Tahun 1839-1848.* Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1973, hal. 84.

[23] Elizabeth E. Graves, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century,* Ithaca: Cornell University, 1981, hlm. 3.

[24] M.D. Mansoer, dkk., *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta: Bhratara, 1970, hlm. 1.

Perairan Pantai Barat Sumatera merupakan bagian dari jalur pelayaran Samudera Hindia yang ramai sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Ombak besar, arus laut kuat, serta tiupan angin muson sepanjang tahun menjadikan kawasan ini berisiko tinggi bagi pelayaran, namun sekaligus strategis dalam jaringan perdagangan internasional.[25] Kondisi geografis tersebut menyebabkan hanya lokasi-lokasi tertentu yang dapat berkembang sebagai bandar utama, seperti Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Sibolga, Barus, Singkil, dan Meulaboh.[26]



"Carte de l'île de Sumatra" tahun 1849 karya Baron P. Melvill van Carnbee: https://www.oldmapsonline.org/en/maps/e0587bf6-351e-55c4-9f35-896ddccc2bee?gid=6136b1ea-e598-5941-b169-7bf287ba9862&year=1849#position=4.2863/1.42/100.57/0.8&year=1832. Di akses pada 22 Januari 2026. Jam 13.59

[25] K.N. Chaudhuri, *Trade and Civilisation in the Indian Ocean, Cambridge*: Cambridge University Press, 1985, hlm. 23.

[26] H.L. Osthoff. "Schets Kaart der Westkust van Sumatra van Taboejong voor de in de Beschrijving van dit Vaarwater Voorkomende Namen". 1839. Lihat juga H.L. Osthoff. "Beschrijving van het Vaarwater Langs de Westkust van Sumatra". Batavia: Landsdrukkerij, 1840.

Peta Carte de l'île de Sumatra tahun 1849 karya P. Baron Melvill van Carnbée memperlihatkan secara jelas pembagian geografis Pantai Barat Sumatera pada abad ke-19. Wilayah ini membentang dari Aceh dan Tapanuli di bagian utara, melalui kawasan pesisir Minangkabau seperti Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, hingga Painan, dan berlanjut ke wilayah selatan seperti Indrapura dan Bencoolen.

Peta tersebut juga menegaskan posisi Pegunungan Bukit Barisan sebagai penghalang alami antara pesisir dan pedalaman, sehingga akses ekonomi dan politik sangat bergantung pada jalur sungai dan pelabuhan laut. Kondisi geografis ini menjadikan Pantai Barat Sumatera sebagai kawasan maritim yang terbuka, strategis, namun sekaligus rentan terhadap gangguan keamanan laut.

Banyaknya pelabuhan kecil, teluk, dan pulau-pulau di sepanjang pesisir yang tergambar dalam peta kolonial ini menunjukkan bahwa kawasan Pantai Barat Sumatera sejak abad ke-19 merupakan ruang pertemuan kepentingan dagang, kekuasaan kolonial, dan aktivitas maritim non-negara, termasuk pembajakan laut.

Pulau-pulau kecil di lepas pantai seperti Kepulauan Mentawai, Nias, dan pulau-pulau di sekitar Tiku memiliki peran penting sebagai daerah singgah kapal, sumber bahan pangan laut, serta basis aktivitas maritim masyarakat pesisir.[27] Namun, karakter alam Pantai Barat Sumatera yang rawan abrasi, gelombang tinggi, dan badai laut juga menyebabkan beberapa bandar mengalami kemunduran

[27] Harry Waluyo, Pengungkapan dan Pengkajian Naskah Kuno Kota Pariaman, Jakarta: Depdikbud, 1996/1997, hlm. 10–11.

pada akhir abad ke-19 seiring berkembangnya jalur transportasi darat dan perubahan kebijakan kolonial.[28]

Dengan demikian, secara geografis Pantai Barat Sumatera pada abad ke-19 merupakan wilayah maritim yang strategis tetapi penuh tantangan alam. Kondisi ini sangat memengaruhi pola permukiman, aktivitas perdagangan, mobilitas penduduk, serta munculnya aktivitas maritim non-negara, termasuk perompakan dan bajak laut, yang berkembang di wilayah perairan terbuka dan pengawasan kolonial yang terbatas.[29]

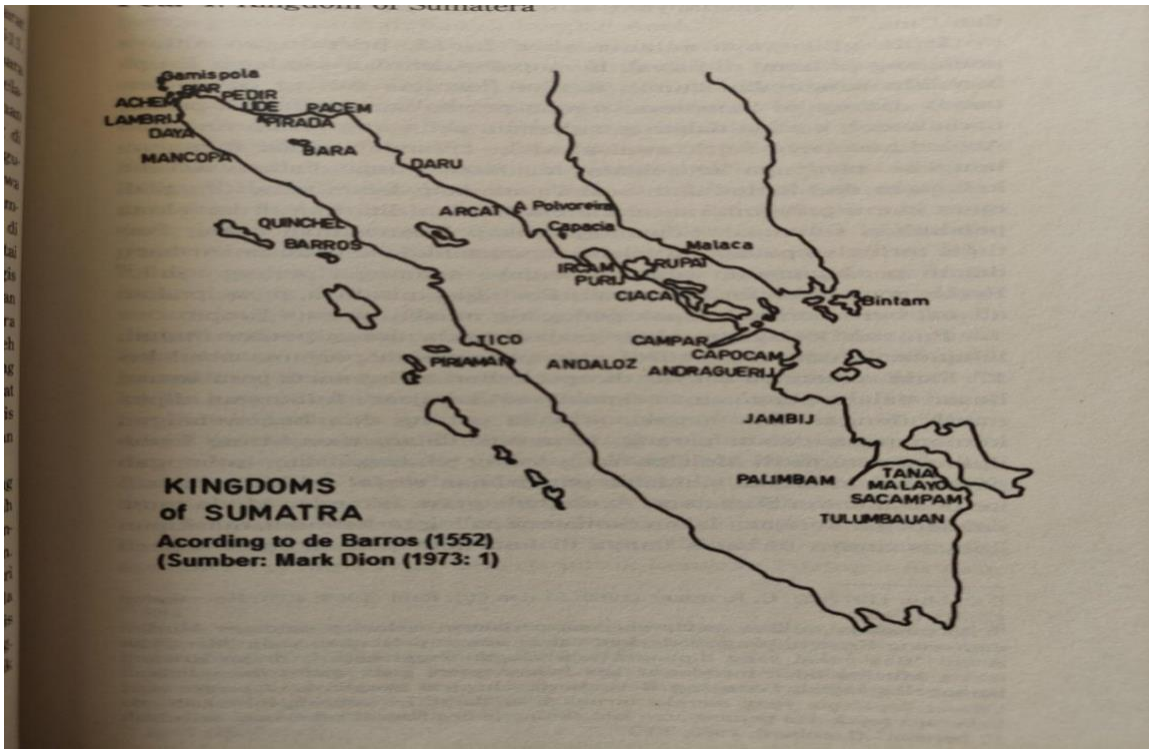
Berdasarkan peta "Kingdoms of Sumatra According to de Barros (1552)" yang di gambaroleh Mark Dion (1973), wilayah Sumatera pada abad ke-16 hingga awal abad ke-19 terdiri atas sejumlah kerajaan dan entitas politik yang tersebar di sepanjang pesisir dan pedalaman.[2] Pada kawasan pantai barat tercatat nama-nama wilayah seperti Barros (Barus), Pariaman, Andalas, hingga wilayah selatan yang berkaitan dengan Palembang dan Jambi. Peta ini menunjukkan bahwa sejak awal kawasan pantai barat tidak berada di bawah satu kekuasaan tunggal, melainkan terfragmentasi ke dalam unit-unit politik kecil yang saling terhubung melalui jalur laut.

Secara topografis, Pantai Barat Sumatera dipisahkan dari wilayah pedalaman oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara pesisir dan pedalaman sangat bergantung pada sungai-sungai

[28] Harry Waluyo, *Pengungkapan dan Pengkajian Naskah Kuno Kota Pariaman,* Jakarta: Depdikbud, 1996/1997, hlm. 10–11.

[29] Bernard H.M. Vlekke, Nusantara: A History of Indonesia, The Hague: W. Van Hoeve, 1965, hlm. 87.

yang bermuara ke Samudera Hindia.[3] Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai jalur distribusi hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan pantai seperti Barus, Tiku, Pariaman, dan Padang. Pola geografis semacam ini memperkuat posisi pantai barat sebagai kawasan transit perdagangan sekaligus ruang interaksi berbagai kepentingan ekonomi dan politik.



Gambar di kutip pada buku Mustika Zed H. 27

B. Dinamika Politik Perdagangan sebelum 1830.

Setelah kekuasaan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Pantai Barat Sumatera berakhir secara tidak terhormat pada 30 November 1795, wilayah ini beralih ke tangan Inggris. Dalam masa English interregnum tersebut, Inggris mempertahankan sejumlah pos penting di pantai barat, antara lain Bengkulu, Natal, Tapanuli, Padang, Air Bangis, dan Pulau Cingkuak. Meskipun Padang

dijadikan pusat administrasi dengan penempatan sekitar seratus serdadu Benggala dan sejumlah pasukan pribumi dari Bengkulu, secara umum Inggris tidak melakukan ekspansi kekuasaan secara aktif ke wilayah pedalaman maupun pesisir lain.[30]

Kebijakan Inggris di Pantai Barat Sumatera lebih menekankan kepentingan perdagangan daripada penguatan kontrol politik langsung. Sebagaimana dicatat oleh Ridder de Stuers, Inggris—sebagai perusahaan dagang—memandang pelaksanaan pemerintahan langsung sebagai sesuatu yang berisiko. Oleh karena itu, mereka cenderung membatasi diri pada pemberian nasihat kepada penguasa lokal dan menyerahkan pengelolaan urusan internal sepenuhnya kepada elite pribumi, selama kepentingan Kompeni tidak terganggu.[31] Model kekuasaan semacam ini menciptakan ruang otonomi yang luas bagi penguasa lokal, tetapi sekaligus menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan keamanan.

Kondisi keamanan di luar pusat Padang pada masa pemerintahan Inggris digambarkan sangat rapuh. Wilayah di luar kota segera berubah menjadi daerah rawa dan belantara yang sulit dijangkau aparat. Tindak kriminal jarang ditindak secara tegas karena pelaku kerap tidak tertangkap. Bahkan apabila otoritas Inggris turut campur, hukuman terberat yang dijatuhkan umumnya hanya berupa pembuangan sementara. [32] Situasi ini berdampak langsung terhadap jalur

[30] E. B. *KIELSTRA*, hlm. 8

[31] H. J. J. L. *Ridder de Stuers*, diterbitkan oleh P. J. Veth Amsterdam, P. N. Van Kampen, 1849, hlm. 28.

[32] *Ibid,* Hlm. 29

perdagangan dan pelayaran di Pantai Barat Sumatera, yang semakin rentan terhadap gangguan, termasuk perompakan laut dan kekerasan antarpelaku dagang.

Upaya pengambilalihan kembali Pantai Barat Sumatera oleh Belanda pasca-Perang Napoleon menunjukkan kompleksitas politik kolonial di kawasan ini. Du Puy ditunjuk sebagai komisaris untuk menerima penyerahan Padang dari Inggris, namun menghadapi penolakan dari Raffles. Bahkan pengembalian Air Bangis secara tegas ditolak oleh Inggris, sehingga memicu negosiasi panjang dan tindakan sepihak Belanda dalam menguasai wilayah tertentu seperti Poeloe Batoe. Baru pada 22 Mei 1819 bendera Belanda kembali dikibarkan di Padang, menandai dimulainya fase kolonial baru dengan orientasi kontrol politik yang lebih kuat dibandingkan masa Inggris.[33]

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum 1830 Pantai Barat Sumatera berada dalam kondisi transisi kekuasaan yang rapuh. Kebijakan Inggris yang longgar dalam urusan pemerintahan dan keamanan menciptakan iklim perdagangan yang relatif bebas, tetapi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor struktural yang memungkinkan berkembangnya praktik kekerasan maritim dan pembajakan laut, yang kelak oleh arsip kolonial Belanda sering direduksi secara simplistis sebagai tindakan kriminal semata, tanpa melihat akar sosial, politik, dan ekonomi di baliknya.

Kepentingan Inggris di Pantai Barat Sumatera pada masa pemerintahannya terbukti sangat terbatas pada keuntungan dagang jangka pendek. Bahkan

[33] Jargaang, *De Gids. 1887*

dibandingkan masa VOC sebelumnya, kontribusi wilayah ini bagi kepentingan negara induk dinilai tidak signifikan. Namun demikian, para pegawai Kompeni Inggris yang diberi kewenangan penuh atas wilayah tersebut justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, sehingga penguasaan daerah-daerah baru lebih diarahkan bagi keuntungan segelintir individu daripada untuk pembentukan tata pemerintahan yang stabil.[34]

Sikap pragmatis Inggris yang berorientasi pada keuntungan langsung tampak jelas hingga setidaknya tahun 1818. Dalam laporan Letnan Jenderal De Kock tertanggal 12 April 1823 mengenai kerusuhan Padang (Padangsche onlusten), disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Inggris, penduduk setempat pernah meminta bantuan untuk menghadapi pengaruh kaum Padri. Karena merasa tidak mampu bertindak secara militer, pemerintah Inggris memilih jalan lunak dengan memberikan uang dan hadiah, yang pada akhirnya berhasil menyingkirkan kaum Padri dari Padang tanpa konfrontasi terbuka.[35]

Keterangan lain mengenai lemahnya kontrol politik Inggris disampaikan oleh E. Francis, yang menyebut bahwa setiap kali terjadi kerusuhan, laporan dikirim ke Bengkulu dan hanya dikirimkan pasukan kecil yang segera ditarik kembali setelah keadaan dianggap tenang. Pola penanganan semacam ini menunjukkan bahwa konflik-konflik lokal tidak dipandang sebagai persoalan serius. Namun dalam kurun 1807–1814, pada masa Residen Grant, muncul permusuhan dengan wilayah VII Koto di selatan Pariaman. Konflik ini tidak

[34] Ridder de Stuers, *De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra*, Jilid I (Amsterdam: P. N. Van Kampen, 1849), hlm. 28.

[35] Laporan Letnan Jenderal De Kock kepada Gubernur Jenderal, 12 April 1823.

ditangani secara tuntas dan justru menimbulkan persoalan berlarut bagi Inggris di tahun-tahun berikutnya. Bahkan sebuah ekspedisi kecil yang dikirim untuk memaksa kepala wilayah tersebut tunduk berakhir dengan kegagalan dan kehilangan dua pucuk meriam.[36]

Dalam kondisi lemahnya wibawa kolonial tersebut, Du Puy mengambil sejumlah langkah administratif dan ekonomi untuk memulihkan kendali pemerintahan di Padang. Ia memberlakukan monopoli garam dan sistem opiumpacht, membuka pelabuhan Padang bagi kapal asing, serta memberikan izin sementara kepada pejabat kolonial untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan. Di bidang keamanan dan hukum, pemerintah kolonial mulai mengatur kontrak dan perjanjian dengan landskap-lanskap pesisir maupun pedalaman sebagai dasar legitimasi kekuasaan Belanda.[37]

Namun, kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan, khususnya dengan wilayah VII Kota dan para Tuanku pedalaman. Du Puy menilai bahwa penguasaan Semawang merupakan langkah strategis untuk menegakkan kembali otoritas kolonial dan mengamankan jalur pengaruh Belanda ke pedalaman Minangkabau. Meskipun awalnya ditolak oleh pemerintah pusat, setelah dilakukan perjanjian dengan beberapa kepala adat—yang menyatakan pemutusan hubungan dengan

[36] E. Francis, *Herinneringen uit den levensloop van een Indisch ambtenaar van 1815 tot 1851*, Jilid III (Batavia: H. M. Van Dorp, 1856–1860), hlm. 151

[37] H. J. J. L. Ridder de Stuers, *De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra* (Amsterdam: P. N. Van Kampen, 1849), hlm. 28–30.

Kerajaan Minangkabau—pemerintah akhirnya mengizinkan pendudukan Semawang.[38]

Pendudukan ini justru memicu konflik baru. Pemerintah pusat keberatan terhadap perjanjian yang dibuat Du Puy dan menolak operasi militer ofensif lebih lanjut. Serangan kaum Padri terhadap pos Semawang menunjukkan rapuhnya pertahanan kolonial, sehingga pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan mengirim Letnan Kolonel Raaff dengan kekuatan militer yang lebih memadai ke Padang. Keputusan ini menandai pergeseran kebijakan dari pendekatan administratif menuju intervensi militer yang lebih sistematis di Pantai Barat Sumatera.[39]

Pertimbangan du Puy untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Kerajaan Minangkabau didorong oleh situasi politik dan ekonomi yang kian tidak stabil akibat ekspansi kaum Padri ke wilayah pedalaman. Serangan dan perampokan yang dilakukan oleh Padri tidak hanya menimbulkan kekacauan sosial, tetapi juga menyebabkan terhentinya aktivitas pertanian dan perdagangan, yang secara langsung berdampak pada menurunnya penerimaan bea masuk dan keluar di Padang. Dengan demikian, stabilisasi politik di pedalaman dipandang sebagai syarat utama bagi pemulihan kepentingan ekonomi kolonial di pesisir barat Sumatera.

[38] H. J. J. L. Ridder de Stuers .*De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra.* Hlm. 31-34

[39] H. J. J. L. Ridder de Stuers, *De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra*. hlm. 35–38

Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk membendung perluasan pengaruh Padri yang telah merambah hingga wilayah kekuasaan Belanda. Pemerintah kolonial memandang kaum Padri bukan sekadar sebagai gerakan keagamaan, tetapi sebagai ancaman politik yang berpotensi menggerus otoritas kolonial. Dalam kerangka ini, intervensi Belanda dibingkai sebagai upaya "pemulihan ketertiban", meskipun pada hakikatnya juga membuka jalan bagi perluasan wilayah kekuasaan kolonial ke daerah pedalaman Minangkabau yang luas, padat penduduk, dan subur.[40]

Kekhawatiran du Puy bahwa para penghulu Minangkabau akan mencari perlindungan kepada kekuatan lain—khususnya Inggris di Bengkulu atau Natal—menunjukkan adanya persaingan imperial yang nyata di Sumatera bagian barat. Dengan reputasi Raffles yang dikenal simpatik terhadap elite lokal, ketakutan ini bukanlah asumsi tanpa dasar. Oleh karena itu, pendekatan Belanda terhadap Minangkabau sejak periode ini tidak semata bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam konteks rivalitas kolonial.[41]

Pengiriman komisi ke wilayah Bovenlanden untuk menilai sikap para penghulu dan kondisi sosial-politik setempat menandai tahap awal penetrasi kolonial yang lebih sistematis ke pedalaman. Fakta bahwa komisi tersebut disertai pengawalan terbatas—bukan pendudukan militer terbuka—menunjukkan kehati-hatian pemerintah kolonial pada fase awal ini. Namun, langkah ini sekaligus

[40] E. Francis, *Herinneringen uit den levensloop van een Indisch ambtenaar, Jilid III* (Batavia: H. M. Van Dorp, 1856), hlm. 158.

[41] Ridder *de Stuers, De vestiging en uitbreiding,* hlm. 49.

menjadi fondasi bagi keterlibatan militer yang lebih luas pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah konflik dengan kaum Padri semakin terbuka.

Pada awal 1820-an, pemerintah kolonial Belanda semakin menegaskan orientasi kebijakan ekonominya di Pantai Barat Sumatra untuk mengarahkan keuntungan perdagangan bagi kepentingan penduduk dan kas negara Belanda. Hal ini tercermin dari dorongan agar pedagang Belanda secara aktif terlibat dalam pelayaran dan perdagangan Padang, yang sebelumnya hampir sepenuhnya dikuasai oleh pedagang asing. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai langkah fiskal guna menutup biaya administrasi kolonial sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan atau pengaruh langsungnya.

Dalam konteks tersebut, diajukan kebijakan pembebasan bea masuk di seluruh Hindia Belanda bagi barang-barang yang telah membayar hak keluar di Padang, sebagai upaya mendorong perdagangan Belanda dan mengurangi ketergantungan pada pedagang asing. Selain itu, muncul pula rencana pencabutan lisensi sementara bagi pejabat kolonial untuk berdagang, yang sebelumnya diberikan pada 1820. Meskipun usulan ini menuai keberatan dari sebagian pejabat tinggi, pemerintah tetap menilai bahwa seiring meningkatnya nilai ekonomi Pantai Barat Sumatra—terutama akibat pesatnya produksi kopi—wilayah ini tidak lagi dapat dipandang sebagai beban, melainkan sebagai aset kolonial yang harus dikelola secara lebih intensif dan menguntungkan.

Namun, selama perdagangan di wilayah tersebut masih didominasi oleh pihak asing dan keuntungan ekonomi tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kolonial, tujuan menjadikan Pantai Barat Sumatra sebagai koloni yang produktif dinilai belum tercapai. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah kolonial untuk memperketat kontrol ekonomi dan, pada saat yang sama, mulai memberi perhatian lebih besar pada faktor keamanan dan stabilitas wilayah, khususnya yang berkaitan dengan jalur pelayaran dan aktivitas maritim.

C. Kemunculan Aktivitas dan Awal Penamaan Bajak laut Di Pantai Barat

Kemunculan aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada awal abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dan militer yang tidak stabil, terutama pasca menguatnya konflik antara kekuatan kolonial Belanda dengan kelompok Padri serta meningkatnya pengaruh Kesultanan Aceh di wilayah pesisir. Arsip kolonial mencatat bahwa pada malam antara 3 dan 4 Desember 1829, terjadi serangan terhadap pos Belanda di Pulau Pontjan (Tapanuli) oleh kelompok yang disebut sebagai "Atjinesche zeeroovers".[42] Peristiwa ini sering diposisikan sebagai salah satu bukti awal maraknya aktivitas pembajakan di kawasan tersebut.

Serangan tersebut dipimpin oleh seorang tokoh bernama Sidi Mara, yang sebelumnya merupakan bagian dari struktur kekuasaan kolonial, tetapi kemudian berbalik menjadi musuh setelah melarikan diri dari penahanan di Natal. Dalam arsip disebutkan bahwa keterlibatan Sidi Mara didorong oleh motif balas dendam

[42] *Op.cit.*Jargang. hlm. 79

atas perlakuan yang ia anggap tidak adil dari pihak kolonial.[43] Fakta ini menunjukkan bahwa apa yang oleh Belanda dilabeli sebagai "bajak laut" tidak selalu merupakan aktor eksternal yang berdiri di luar sistem, melainkan sering kali berasal dari dalam jaringan sosial-politik kolonial itu sendiri.

Serangan terhadap Pontjan dilakukan dengan strategi yang sederhana namun efektif. Dalam kondisi cuaca hujan, Sidi Mara bersama sekitar 10–12 orang mendarat secara diam-diam, membunuh penjaga, dan menciptakan kepanikan di dalam garnisun kecil Belanda. Akibatnya, tidak terjadi perlawanan yang berarti, dan pos tersebut dengan mudah dikuasai. Setelah berhasil menguasai wilayah tersebut, kelompok Sidi Mara tidak hanya melakukan perampasan, tetapi juga penghancuran infrastruktur kolonial: benteng dihancurkan, meriam dilumpuhkan, bangunan pemerintah dibakar, serta permukiman lokal turut dirusak sebelum mereka kembali ke basis mereka di Baros.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa aktivitas yang dikategorikan sebagai pembajakan tidak terbatas pada perampokan kapal di laut, tetapi juga mencakup serangan terhadap pos-pos kolonial di wilayah pesisir. Dengan kata lain, batas antara "perang", "pemberontakan", dan "pembajakan" menjadi kabur dalam konteks Pantai Barat Sumatra pada periode ini. Hal ini sejalan dengan pandangan sejarawan seperti Christine Dobbin yang menekankan bahwa konflik di Sumatra

[43] *Ibid.*Hlm. 39.

Barat pada awal abad ke-19 merupakan bagian dari dinamika kekuasaan lokal yang kompleks, bukan sekadar gangguan keamanan.[44]

Lebih jauh, arsip tersebut juga menggambarkan kondisi yang semakin memburuk setelah peristiwa Pontjan. Belanda mengakui bahwa "di mana-mana musuh memperoleh pijakan", baik di wilayah pesisir maupun pedalaman. Kelompok Padri berhasil memperluas pengaruh mereka, menghancurkan kampung-kampung, merusak kebun kopi seperti di Soengi Terap, serta melakukan penjarahan terhadap manusia dan ternak. Dalam situasi ini, aktivitas maritim bersenjata yang oleh Belanda disebut sebagai "zeeroof" sebenarnya merupakan bagian dari jaringan konflik yang lebih luas antara kekuatan lokal dan kolonial.[45]

Dari perspektif historiografi kritis, penggunaan istilah "bajak laut" dalam arsip kolonial perlu dipahami sebagai konstruksi wacana kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Anthony Reid, kawasan perairan Asia Tenggara sejak lama merupakan ruang interaksi ekonomi yang dinamis, di mana kekerasan maritim sering kali menjadi bagian dari praktik politik dan ekonomi, bukan semata tindakan kriminal. Dalam konteks ini, tindakan seperti perampasan kapal, blokade pelabuhan, atau penyerangan terhadap pos kolonial dapat dipahami sebagai strategi untuk mengontrol jalur perdagangan dan mempertahankan kedaulatan lokal.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Gusti Asnan yang menunjukkan bahwa wilayah Pantai Barat Sumatra memiliki jaringan perdagangan dan kekuasaan lokal

[44]. Cristine Dobbin, "*Islamic Revivalism In A Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847." Hlm. 71*

[45]. Klielstra, *Sumatra wetscust.* Hlm.331

yang kuat sebelum intervensi kolonial. Oleh karena itu, munculnya aktivitas yang dilabeli sebagai pembajakan tidak bisa dilepaskan dari upaya masyarakat lokal untuk merespons penetrasi ekonomi dan politik Belanda, termasuk monopoli perdagangan dan penguasaan wilayah pesisir.[46]

Dengan demikian, kemunculan awal aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada dekade 1820-an tidak dapat dipahami sebagai fenomena kriminal semata. Ia merupakan bagian dari proses transformasi politik dan ekonomi yang lebih luas, di mana aktor-aktor lokal—baik dari Aceh, Minangkabau, maupun jaringan pesisir lainnya—berusaha mempertahankan posisi mereka di tengah ekspansi kolonial. Peristiwa seperti serangan Sidi Mara di Pontjan menjadi bukti bahwa laut bukan hanya ruang perdagangan, tetapi juga arena perebutan kekuasaan.[47]

Namun, situasi di wilayah pesisir (Benedenlanden) justru memperlihatkan eskalasi konflik yang lebih kompleks. Pos Belanda di Pulau Pontjan, Teluk Tapanuli yang sebelumnya didirikan sebagai langkah defensif terhadap serangan bajak laut Aceh diserang pada Desember 1829 oleh seorang pemimpin maritim Aceh bernama Sidi Mara. Serangan ini menunjukkan bahwa aktivitas bajak laut Aceh bukanlah tindakan sporadis, melainkan bagian dari kontrol maritim atas jalur pelayaran antara Tapanuli, Baros, dan Air Bangis.[48]

[46]. Reinier D. Verbeek*, De Zilver en Goudmijnen van Salida, hlm.1*

[47] E.B. Kliestra. 333

[48]. Mutika Zed, *Saudagar Pariaman, menerjang Ombak membangun Maskapai.* (LP3ES).Hlm.95-120. air bangis,tapanuli, Barus sejak dulu menjadi tempatpenting bagi perdagangan dunia.

Upaya Belanda untuk merebut kembali posisi strategis tersebut melalui ekspedisi Letnan A. Wille gagal setelah pasukannya mendapat perlawanan sengit di Baros, sehingga ia terpaksa mundur ke Padang.[49] Kegagalan ini menegaskan keterbatasan kekuatan kolonial di wilayah pesisir yang secara geografis sulit dijangkau dan secara sosial berada di bawah pengaruh elite lokal dan jaringan maritim non-kolonial.

Perlawanan bersenjata tidak hanya terjadi di satu titik. Sejumlah penghulu dari XII Kota, bersama deserter dan budak yang melarikan diri, bahkan bergerak menuju Padang, meskipun akhirnya dapat dipukul mundur. Di wilayah yang lebih utara, ekspansi Padri berlangsung bersamaan dengan blokade laut oleh perahu-perahu Aceh di bawah pimpinan Sidi Mara, seperti yang terjadi di Air Bangis.[50] Fakta ini memperlihatkan adanya kerja sama fungsional antara kelompok darat dan aktor maritim, yang oleh arsip kolonial diberi label sebagai “bajak laut”,[51]

tetapi secara historiografis menurut Ann Laura Stoler Arsip lebih merupakan "sistem pernyataan", "aturan praktik", yang membentuk keteraturan khusus dari apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan, hal terebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika kekuasaan lokal dan perlawanan terhadap dominasi kolonial.[52]

[49]. Laporan ekspedisi Letnan A. Wille ke Baros, Arsip Militer Belanda, 1829. lihat juga pada Officieele Bescheiden hlm. 9. 1881

[50]. E.Francis, *Herinneringen Levensloop Van 1815-1851*.hlm.64

[51] *Ibid*.hlm 170

[52]. Ann Laura Stoler, *Colonial Archive and The Arts of Governance*. (Kluwer,Belanda : 2022).hlm 17

Dalam konteks ini, istilah zeeroover yang digunakan dalam arsip Belanda mencerminkan sudut pandang keamanan kolonial yang menyederhanakan realitas politik maritim Pantai Barat Sumatra. Sejumlah sejarawan menegaskan bahwa aktivitas maritim bersenjata di kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari struktur perdagangan, kedaulatan lokal, dan resistensi terhadap monopoli kolonial.[53]

BAB III

BENTUK-BENTUK AKTIVITAS BAJAK LAUT DI PANTAI BARAT SUMATRA

A. Periode 1820-1830

Pasca ditandatanganinya Traktat London tahun 1824, pemerintah kolonial Belanda mulai mengambil alih pengaruh politik dan administrasi Inggris di Pantai Barat Sumatra. Pengambilalihan tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan wilayah kekuasaan, tetapi juga menandai dimulainya upaya Belanda membangun kembali kontrol terhadap jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Pantai Barat Sumatra dengan kawasan Samudra Hindia. Dalam proses tersebut, wilayah-wilayah pesisir yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Aceh menjadi perhatian utama pemerintah kolonial karena secara politik maupun ekonomi belum sepenuhnya berada di bawah pengaruh Belanda.

[53]. *Ibid.* hlm. 14

» *Art.* 15. Ten aanzien der mededeeling aan den vorst van Atjeh, zal in allen geval noodzakelijk zijn, dat vooraf door het Britsch Gouvernement aan dien vorst opening zij gedaan van de bepalingen, ten aanzien van dit rijk bij het tractaat voorkomende.

» *Art.* 16. Commissarissen zullen ten spoedigste berigt zenden van hetgeen met betrekking tot de communicatie aan den vorst van Atjeh van de zijde der Britsche autoriteiten zal zijn geschied, ten einde daarna de punten van instructie voor een definitief tractaat met dat rijk van hier nader te zenden.

» *Art.* 17. Intusschen wordt aan Commissarissen opgedragen, om niets te verzuimen tot het bekomen van de meest naauwkeurige informatiën omtrent den handel van het rijk van Atjeh en de aldaar te behalen voordeelen, alsmede generaal van alles wat den staat van zaken in de over te nemen landen aanbetreft, in het bijzonder de specerijhandel en meer bepaaldelijk die van de peper en den handel in dit product."

Photarsip kolonial

Dalam instruksi resmi kepada para komisaris kolonial, pemerintah Belanda menekankan pentingnya memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi perdagangan Aceh, khususnya komoditas lada, serta keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari wilayah tersebut. Perhatian besar terhadap perdagangan lada menunjukkan bahwa laut dan jalur pelayaran di sekitar Pantai Barat Sumatra tidak hanya dipandang sebagai ruang strategis militer, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang bernilai tinggi bagi kepentingan kolonial.[54] Namun demikian, keterbatasan kontrol langsung Belanda atas Aceh membuat upaya pengawasan maritim di kawasan ini menjadi tidak efektif.

Arsip kolonial memperlihatkan bahwa pemerintah Belanda memandang hubungan dengan Kesultanan Aceh sebagai persoalan yang harus ditangani secara hati-hati. Hal ini tercermin dalam instruksi resmi kepada para komisaris kolonial yang menegaskan bahwa pemberitahuan mengenai ketentuan Traktat London kepada Sultan Aceh terlebih dahulu harus dilakukan oleh pemerintah Inggris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Belanda mengakui adanya hubungan diplomatik yang sebelumnya telah terjalin antara Aceh dan Pemerintah Bengal,

[54] Teks Perjanjian London 1824 dan implikasinya terhadap pembagian wilayah pengaruh Inggris Belanda di Asia Tenggara dapat dilihat dalam arsip kolonial Belanda dan kumpulan traktat Hindia Belanda.lihat pada photo

sehingga pengambilalihan pengaruh di Pantai Barat Sumatra tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan posisi politik Kesultanan Aceh..[55]

Selain mengatur aspek diplomatik, pemerintah kolonial juga memerintahkan para komisaris untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai keadaan Aceh. Perhatian utama diarahkan pada kondisi perdagangan, terutama komoditas lada, keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh, serta situasi politik di wilayah-wilayah yang akan diserahkan kepada Belanda. Instruksi tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal pengambilalihan Pantai Barat Sumatra, kepentingan ekonomi menjadi pertimbangan utama pemerintah kolonial. Penguasaan terhadap jalur perdagangan dan komoditas ekspor dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi memperkuat dominasi Belanda di kawasan tersebut.

Pada tahap ini, persoalan yang dihadapi pemerintah kolonial belum sepenuhnya berkaitan dengan aktivitas bajak laut. Fokus utama Belanda masih tertuju pada proses konsolidasi kekuasaan, pemetaan kondisi politik, serta pengamanan jalur perdagangan yang sebelumnya berada dalam jaringan pengaruh Inggris dan Kesultanan Aceh. Namun, upaya memperluas kontrol kolonial terhadap wilayah pesisir inilah yang kemudian memunculkan berbagai bentuk perlawanan dari kelompok-kelompok lokal pada dekade berikutnya. Dalam arsip kolonial, sebagian kelompok tersebut kemudian diberi label sebagai zeeroovers (bajak laut), meskipun dalam praktiknya tidak seluruhnya dapat dikategorikan

[55] Tentang pengambilalihan Pantai Barat Sumatra, 12 April 1825.

sebagai pelaku perompakan murni karena sebagian melakukan perlawanan terhadap perluasan kekuasaan kolonial Belanda.

Akibat lemahnya pengawasan tersebut, laporan dari Residen Sumatra's Westkust pada tahun 1828 mengungkap bahwa kapal-kapal Belanda terpaksa berlayar dan berdagang ke Aceh dengan menggunakan bendera Amerika atau Inggris demi menghindari tindakan permusuhan. Pemerintah kolonial mengakui bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki wilayah kekuasaan resmi di Aceh. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana keterbatasan kedaulatan kolonial membuka peluang bagi berbagai bentuk aktivitas maritim di luar kontrol Belanda .[56]

B. Periode 1830-1840

Meningkatnya aktivitas perompakan di wilayah Pantai Barat Sumatra mendorong pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah awal dalam rangka pemulihan keamanan maritim. Berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 15 Januari 1830, tindakan yang dilakukan oleh Residen di Padang dalam merebut kembali benteng dan aset kolonial di Tapanoli, serta dalam upaya pengejaran terhadap kelompok perompak Aceh, secara resmi disetujui oleh pemerintah pusat. Keputusan ini menunjukkan bahwa aktivitas bajak laut telah

[56] Officele Bescheiden Betreffende Het Ontstaan Van Den orloog Tegen Atjeh In 1873.Van Regeringswege uitgegeven ter Algemeene Landsdrukkerij in 1881, Hlm. 11

dipandang sebagai persoalan serius yang mengancam stabilitas kekuasaan kolonial di wilayah pesisir Sumatra Barat.[57]

Sebagai tindak lanjut, pemerintah kolonial menetapkan pengiriman sebuah kapal perang ke Pantai Barat Sumatra untuk sementara waktu berada di bawah komando Residen. Kapal ini ditugaskan untuk mengawasi wilayah utara residensi, termasuk kemungkinan berlayar ke Troemon guna menjalin kontrak politik dengan penguasa setempat. Troemon dipandang sebagai wilayah strategis karena rajanya dianggap memiliki pengaruh terhadap para pedagang dan pelaut Aceh yang sering melakukan pelayaran di sepanjang pantai. Instruksi kolonial secara eksplisit menegaskan bahwa kapal yang dikirim harus berukuran cukup besar agar mampu "menanamkan rasa hormat terhadap bendera Belanda" di mata masyarakat Aceh.[58]

Pada 25 November 1830, Residen Mac Gillavry berhasil menandatangani kontrak dengan Raja Troemon sebagai bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda memperluas pengaruh politiknya di Pantai Barat Sumatra. Melalui kontrak tersebut, Belanda berharap dapat memperoleh dukungan penguasa lokal dalam mengawasi aktivitas pelayaran sekaligus menekan jaringan maritim Aceh. Namun, perjanjian tersebut segera menuai kritik di lingkungan pemerintah kolonial sendiri karena disusun berdasarkan pemahaman yang kurang tepat mengenai kedudukan politik Troemon terhadap Kesultanan Aceh. Akibatnya, kontrak tersebut tidak pernah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal.

[57] Besluit der Indische Regering, 15 Januari 1830, mengenai pengiriman kapal perang ke Pantai Barat Sumatera

[58] *Ibid*

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pada awal dekade 1830-an Belanda masih menghadapi keterbatasan dalam memahami struktur politik lokal sehingga strategi diplomasi yang ditempuh belum mampu memperkuat pengaruh kolonial di kawasan pesisir..[59]

Situasi keamanan laut semakin memburuk pada awal 1831. Pada Februari tahun tersebut, sebuah kapal dagang Amerika Serikat, *Friendship*, yang tengah berlabuh untuk berdagang di pelabuhan Kwalla Batoe, diserang dan dijarah oleh kelompok pelaut Aceh. Dalam peristiwa tersebut, nakhoda dan beberapa awak kapal dibunuh. Insiden ini menimbulkan reaksi internasional dan mendorong pemerintah Amerika Serikat mengirimkan fregat Potomac untuk melakukan aksi pembalasan. Pemerintah kolonial Belanda memilih untuk tidak terlibat langsung, dengan alasan bahwa kewajiban yang timbul dari Perjanjian London 1824 belum sepenuhnya dapat mereka laksanakan, serta karena posisi Belanda di mata Aceh masih lebih lemah dibandingkan kekuatan asing lainnya.[60]

Dalam arsip kolonial tercatat adanya kesadaran bahwa selama Belanda belum mampu menegakkan pengaruh politik dan militer secara efektif di wilayah Padang dan daerah bekas pengaruh Padri, maka pelaut Aceh akan terus memandang bendera Belanda tanpa rasa segan. Oleh karena itu, peneguhan

[59] Arsip Kolonial, besluit dan laporan Residen Sumatra's Westkust mengenai kontrak Troemon, 1830. Lihat juga dalam P.J. Veth (ed.), De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra.

[60] Officele Bescheiden Betreffende Het Ontstaan Van Den orloog Tegen Atjeh In 1873.Van Regeringswege uitgegeven ter Algemeene Landsdrukkerij in 1881, Hlm. 13

kekuasaan di darat dipandang sebagai prasyarat utama untuk mengendalikan aktivitas maritim di laut.[61]

Laporan-laporan resmi dari otoritas kolonial di Sumatra Barat pada periode ini dipenuhi keluhan terhadap aktivitas perompakan Aceh. Dalam laporan Residen Elout tanggal 17 Desember 1831, disebutkan bahwa pelaut Aceh menguasai hampir seluruh pesisir utara Pantai Barat Sumatra. Baros dilaporkan telah berubah menjadi pusat penyelundupan barang, sementara Pulau Mansalar di depan Tapanoli disebut sebagai sarang perompak Aceh. Bahkan, masyarakat di Pulau Rengawan dilaporkan berada di bawah pengaruh Raja Troemon dan diwajibkan menyerahkan seluruh hasil lada kepada penguasa tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana aktivitas bajak laut tidak hanya berupa perampokan kapal, tetapi juga mencakup penguasaan jalur perdagangan, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya lokal.[62]

Laporan Mayor Michiels pada 6 Februari 1832 semakin menegaskan bahwa aktivitas perompakan Aceh telah menciptakan kondisi yang sangat merugikan bagi pos-pos kolonial Belanda seperti Tapanoli, Natal, dan Air Bangis. Pos-pos tersebut digambarkan berada dalam keadaan tertekan akibat dominasi pelaut Aceh atas perdagangan dan pelayaran di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada awal dekade 1830-an, bajak laut telah menjadi aktor penting

[61] Op cit Jargag.hlm.41

[62]. E.B. Kielstra, "*Atjeh en de verhouding tot Nederland van 1819–1824 en 1831–1873," Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (BKI), Deel 43* (1894), hlm. 27–29.

dalam dinamika maritim Pantai Barat Sumatra, baik sebagai pelaku kekerasan laut maupun sebagai pengendali ekonomi pesisir.[63]

Laporan Mayor Michiels pada 6 Februari 1832 kembali menegaskan bahwa pos-pos kolonial di Tapanuli, Natal, dan Air Bangis mengalami tekanan akibat dominasi pelaut Aceh atas aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut. Namun demikian, penggunaan istilah zeeroovers (bajak laut) dalam arsip kolonial perlu dibaca secara kritis. Tidak semua kelompok yang diberi label tersebut dapat dipahami sebagai pelaku kejahatan maritim dalam pengertian modern. Sebagian di antaranya merupakan jaringan pelaut, pedagang, dan penguasa lokal yang berusaha mempertahankan pengaruh ekonomi serta politiknya di tengah semakin luasnya ekspansi kolonial Belanda. Dengan demikian, aktivitas yang oleh pemerintah kolonial disebut sebagai pembajakan pada awal dekade 1830-an memperlihatkan adanya batas yang kabur antara tindakan kriminal di laut dan bentuk perlawanan terhadap penetrasi kolonial di Pantai Barat Sumatra..[64]

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mulai memandang persoalan keamanan maritim sebagai masalah politik yang lebih luas daripada sekadar tindakan pembajakan di laut. Menurut Michiels, para pelaut Aceh dan penguasa-penguasa lokal tidak hanya melakukan gangguan terhadap pelayaran, tetapi juga tetap mengklaim hak atas wilayah-wilayah yang oleh pemerintah

[63] *Nederland van Indie. Hlm. 12*

[64]. Laporan resmi Mayor Andreas Victor Michiels, awal 1832, dikirim ke Pemerintah Hindia Belanda di Padang & Batavia (kode arsip: Koloniale Archieven, Sumatra's Westkust, 1832, No. 17/45)

kolonial dianggap telah berada di bawah kekuasaan Belanda berdasarkan berbagai perjanjian sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan Belanda atas Pantai Barat Sumatra masih belum sepenuhnya diakui oleh kekuatan-kekuatan lokal di kawasan pesisir..

Menghadapi kondisi tersebut, Michiels mengajukan usulan yang menegaskan bahwa pemulihan kekuasaan kolonial harus diawali dengan demonstrasi kekuatan militer di wilayah-wilayah pelabuhan yang dianggap "bebas", bahkan hingga ke wilayah Aceh sendiri. Menurutnya, hanya melalui kehadiran langsung dan perundingan dengan penguasa Aceh serta negara-negara bawahan dan tetangganya, Belanda dapat menetapkan ketentuan dagang dan politik yang jelas, sekaligus mencegah kesalahpahaman dengan kekuatan Eropa lainnya. Usulan ini menunjukkan bahwa aktivitas bajak laut telah mendorong perubahan cara pandang kolonial: dari sekadar penindakan lokal menuju kebutuhan akan penataan ulang hubungan politik dan maritim secara regional.[65]

Pandangan tersebut sejalan dengan laporan Residen Elout tertanggal 6 Maret 1832. Elout mengusulkan agar pemerintah kolonial menempuh pendekatan diplomatik melalui Pulau Pinang dengan menelusuri kembali hubungan Inggris dan Aceh sebelum maupun sesudah Perjanjian London 1824. Menurutnya, kejelasan mengenai hubungan politik tersebut diperlukan agar Belanda dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian sekaligus memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam menangani persoalan keamanan

[65]. M. Ali Maksum, *Laut, Bajak, dan Kuasa: Sejarah Maritim Pantai Barat Sumatra Abad ke-19* (Yogyakarta: Penerbit Ombak bekerja sama dengan IKOSI, 2014), hlm. 42–43.

maritim. Elout juga meminta agar Residen Sumatra's Westkust diberi kewenangan yang lebih luas serta dukungan kapal perang sehingga dapat berhubungan langsung dengan para penguasa lokal di kawasan pesisir.[66]

Meskipun berbagai rekomendasi telah diajukan oleh Michiels dan Elout, arsip kolonial menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak segera menindaklanjutinya. Keterlambatan tersebut menyebabkan pengamanan jalur pelayaran di Pantai Barat Sumatra belum dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga aktivitas kelompok-kelompok bersenjata di wilayah pesisir masih terus berlangsung.

Dampak dari lambannya respons pemerintah kolonial tercermin dalam Indisch Besluit tanggal 21 November 1834 yang diawali dengan laporan Residen Sumatra's Westkust mengenai situasi keamanan di Baros. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa wilayah Baros terus mengalami gangguan dari kelompok Aceh yang bermarkas di Batce Grigie, di muara Sungai Baros. Menurut arsip kolonial, kelompok tersebut melakukan penyerangan terhadap pelayaran, menguasai jalur perdagangan, serta terlibat dalam perdagangan budak. Kondisi tersebut mendorong para kepala adat Baros berulang kali meminta perlindungan kepada pemerintah kolonial, termasuk melalui permohonan penempatan pasukan tetap di wilayah mereka.[67]

[66]. Nationaal Archief Belanda. Arsip Koloni Hindia Belanda, Residentie Sumatra's Westkust Tahun 1832, Nomor Surat 17/45 dan 21/148.

[67] surat dari Residen Pantai Barat Sumatera, tertanggal 30 Juni lalu, no. 27, yang merujuk pada komunikasi dari Letnan Kolonel-Ajudan MICHIELS, yang melaporkan keadaan yang tidak menguntungkan di Baros.

Situasi keamanan maritim yang belum sepenuhnya pulih terus berlanjut hingga pertengahan dekade 1830-an. Pada Juni 1836, sekunar Dolphyn milik pemerintah kolonial yang mengangkut uang logam senilai sekitar 30.000 gulden dilaporkan dibawa lari oleh awak pribuminya di perairan antara Padang dan Natal. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap pelayaran kolonial tidak semata-mata berasal dari kelompok Aceh yang oleh pemerintah Belanda disebut sebagai zeeroovers, tetapi juga muncul dari persoalan internal dalam sistem pelayaran kolonial sendiri, termasuk lemahnya pengawasan terhadap awak kapal dan jalur distribusi logistik.[68]

Kasus hilangnya sekunar Dolphijn pada tahun 1836 memperlihatkan bahwa persoalan keamanan maritim di Pantai Barat Sumatra tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pembajakan, tetapi juga melibatkan hubungan politik antara pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Aceh. Setelah kapal tersebut dibawa lari oleh awak pribuminya dan diketahui berada di wilayah Aceh, pemerintah kolonial mengirim korvet Van Speyk di bawah komando Kapitein ter Zee Van der Straten untuk melakukan pencarian. Kapal tersebut berhasil ditemukan di Aceh, namun Sultan Aceh menolak menyerahkannya karena komandan Van Speyk tidak membawa surat kuasa resmi dari Gubernur Jenderal yang ditujukan kepadana. [69]

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Jenderal mengirimkan surat resmi kepada Sultan Aceh untuk meminta agar Dolphijn diserahkan kepada utusan yang

[68] Officieele Bescheiden (Dokumen Resmi), landsdrukkerij. in 1873, tentang perang melawan actceh. Hlm.11

[69] . *Ibid. hlm 11*

akan datang menjemput kapal tersebut. Bersamaan dengan itu, melalui keputusan tanggal 14 November 1836, Residen Sumatra's Westkust diperintahkan untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam menangani perkara ini. Pemerintah kolonial secara eksplisit menekankan bahwa apabila Sultan Aceh bersedia mengembalikan Dolphijn dalam kondisi layak pakai, maka tuntutan lanjutan—seperti pengembalian uang pemerintah sebesar 30.000 gulden serta perlengkapan persenjataan, maupun penyerahan awak kapal—tidak perlu ditekan secara berlebihan. Pertimbangan utama pemerintah kolonial adalah menghindari tindakan yang berpotensi merusak hubungan damai dengan Sultan Aceh.[70]

Meski demikian, upaya diplomatik tersebut tidak menunjukkan hasil yang berarti. Tidak terdapat bukti bahwa perundingan lanjutan berhasil memperoleh pengembalian kapal, muatan, ataupun awak Dolphijn. Ketegangan di wilayah pesisir justru semakin meningkat. Pada tahun 1838, pemerintah kolonial mengerahkan fregat de Zaan dan kruisschoener de Haai untuk melakukan patroli laut guna melindungi Baros dari serangan pihak Aceh. Selain itu, Gubernur Sumatra's Westkust diberi kewenangan untuk menduduki dan memperkuat Baros apabila situasi menuntut tindakan tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya aktivitas kelompok Aceh yang berusaha menetap dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut.[71]

Reaksi dari pihak Aceh menunjukkan bahwa konflik telah memasuki tahap yang lebih terbuka. Kelompok Aceh mulai memperkuat kedudukan mereka di

[70] . *Ibid. hlm. 11*

[71] W. L. RITTER*, Catatan Singkat tentang Kerajaan Aceh*", yang dimuat dalam Jurnal Hindia Belanda, Volume 1, Bagian 2, hlm. 454-476

Singkel dengan membangun blokhuis dan baterai pertahanan. Bahkan, di hadapan Baros, tepatnya di sekitar Sungai Matjo, didirikan tiga benteng (bentings) yang dijaga oleh sekitar 500 hingga 600 orang. Pembangunan infrastruktur militer ini menandai bahwa aktivitas maritim yang sebelumnya dicap sebagai pembajakan telah berkembang menjadi ancaman terorganisasi terhadap kekuasaan kolonial di Pantai Barat Sumatra.[72]

Peristiwa Dolphijn menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mulai menyadari pentingnya penyelesaian melalui jalur diplomasi dalam menghadapi persoalan keamanan maritim. Berbeda dengan kasus-kasus pembajakan yang diselesaikan melalui operasi militer, sengketa ini ditangani melalui negosiasi dengan Sultan Aceh karena menyangkut kewibawaan politik kedua belah pihak. Dengan demikian, kasus Dolphijn tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pembajakan, melainkan juga sebagai cerminan belum diakuinya secara penuh otoritas Belanda oleh Kesultanan Aceh. Penolakan Sultan Aceh lebih berkaitan dengan persoalan legitimasi dan hubungan antarpemerintahan daripada dukungan terhadap tindakan kriminal di laut. Oleh sebab itu, peristiwa ini memperlihatkan bahwa tidak semua kasus yang dikaitkan dengan "bajak laut" dalam arsip kolonial merupakan kejahatan maritim murni, tetapi sering kali berhubungan dengan sengketa politik dan kedaulatan di kawasan Pantai Barat Sumatra.

C. Periode 1840-1850

[72]. Officieele Bescheiden (Dokumen Resmi), landsdrukkerij. Thn 1881, tentang perng melawan actceh. Hlm.13

Menjelang akhir dekade 1830-an, pemerintah kolonial semakin meyakini bahwa pengamanan Pantai Barat Sumatra tidak dapat dicapai hanya melalui operasi militer sesaat. Setelah berbagai ekspedisi dilakukan, Kolonel Andreas Victor Michiels menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah kolonial mampu menunjukkan kekuatan militer sekaligus mempertahankan kehormatan bendera Belanda di wilayah pesisir. Menurutnya, penegakan wibawa tersebut menjadi syarat utama untuk memulihkan keamanan pelayaran dan memperkuat posisi politik Belanda di hadapan para penguasa lokal.

Dalam laporan tertanggal 14 Mei 1840, Kolonel Michiels menegaskan bahwa konflik dengan Aceh tidak dapat lagi dipahami sebagai persoalan insidental. Menurutnya, perang dengan Aceh pada hakikatnya telah berlangsung, dan meskipun pemerintah kolonial tidak berniat melakukan perluasan wilayah lebih jauh dari Singkel, perdamaian hanya dapat dicapai melalui cara-cara yang bermartabat dan menunjukkan kekuatan. Michiels menekankan bahwa hanya dengan menegakkan wibawa senjata dan kehormatan bendera Belanda, stabilitas dan keamanan maritim di Pantai Barat Sumatra dapat dipulihkan secara berkelanjutan.[73]

Pandangan tersebut semakin terlihat setelah pelaksanaan Ekspedisi Singkel pada tahun 1840. Pemerintah kolonial menilai bahwa penguasaan wilayah pesisir saja belum cukup untuk menjamin keamanan perdagangan. Michiels berpendapat bahwa stabilitas maritim memerlukan borg van genoegzame veiligheid (jaminan keamanan yang memadai) sehingga para pedagang dan

[73] Ketetapan Pemerintah Hindia Belanda Pada tanggal 19 Oktober 1837, no. 16,

perusahaan dagang memiliki kepercayaan untuk kembali berlayar dan berinvestasi di Pantai Barat Sumatra. Atas dasar itu, ia mengusulkan agar kapal-kapal perang Belanda terus melakukan patroli di sekitar Singkel dan wilayah utara Pantai Barat Sumatra guna menekan aktivitas kelompok-kelompok bersenjata yang mengganggu pelayaran.[74]

Pemerintah kolonial berusaha membatasi operasi militernya agar tidak dipandang sebagai perang terbuka melawan Kesultanan Aceh. Dalam berbagai dokumen resmi, sasaran operasi lebih sering disebut sebagai *Atjehsche onruststokers* (pengacau Aceh) daripada pemerintah Aceh sebagai suatu negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Belanda tetap berupaya menghormati ketentuan Traktat London 1824 yang mengakui keberadaan Aceh sebagai entitas politik, sehingga setiap tindakan militer diarahkan kepada kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu keamanan pelayaran dan kepentingan kolonial, bukan terhadap Kesultanan Aceh secara langsung.

Sebagai pelengkap strategi militer, pemerintah kolonial juga mengembangkan pendekatan politik melalui pembentukan wilayah penyangga (buffer state). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin perjanjian dengan Kerajaan Troemon pada 26 Juni 1840. Berdasarkan traktat tersebut, Raja Troemon berkewajiban mencegah setiap gerakan yang mengancam kepentingan Belanda di Singkel, termasuk dengan menggunakan kekuatan apabila diperlukan. Sebagai imbalannya, pemerintah kolonial menjamin perlindungan terhadap

[74] Officieele Bescheiden (Dokumen Resmi), landsdrukkerij. Thn 1881, tentang perng melawan actceh. Hlm. 14

Troemon dari serangan pihak lain. Perjanjian ini memperlihatkan bahwa Belanda mulai memanfaatkan penguasa-penguasa lokal sebagai bagian dari sistem pengamanan wilayah perbatasan sekaligus untuk mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok Aceh di pesisir barat Sumatra.[2].[75]

Meskipun Ekspedisi Singkel memberikan dampak psikologis terhadap kelompok-kelompok Aceh, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Berkurangnya kehadiran militer Belanda di wilayah utara Pantai Barat Sumatra menyebabkan serangan-serangan kembali terjadi. Pada tahun 1848, kelompok bersenjata dari Aceh kembali menyerang etablissement Singkel, meskipun serangan tersebut berhasil digagalkan oleh pihak kolonial. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengamanan melalui ekspedisi militer belum mampu menghilangkan perlawanan di kawasan tersebut secara permanen.[76]

Aktivitas kelompok Aceh juga meluas hingga ke wilayah kepulauan. Pada tahun 1851, pemerintah kolonial mengirim kapal perang Pylades bersama satu detasemen infanteri ke Kepulauan Banyak untuk mengusir kelompok Aceh yang menjadikan kawasan tersebut sebagai basis operasi. Menurut laporan kolonial, kelompok tersebut melakukan perampasan terhadap kapal-kapal yang melintas sehingga mengganggu jalur perdagangan di kawasan itu. Dalam konteks ini, tindakan tersebut lebih mendekati praktik pembajakan karena sasaran utamanya adalah kapal dagang dan aktivitas perdagangan, berbeda dengan berbagai

[75] *Ibid.* hlm. 14

[76]. Langen, K.F.H. van. (1888). *De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur*. Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 112–113.

serangan sebelumnya yang banyak berkaitan dengan konflik politik dan militer antara Aceh dan pemerintah kolonial.[77]

D. Periode 1850-1860

Aktivitas kelompok-kelompok Aceh di wilayah kepulauan juga terus berlanjut. Pada tahun 1851, pemerintah kolonial Belanda mengirim kapal perang Pylades bersama satu detasemen infanteri ke Kepulauan Banyak untuk mengusir kelompok yang oleh arsip kolonial disebut sebagai perompak Aceh. Menurut laporan resmi, kelompok tersebut menjadikan kepulauan itu sebagai pangkalan operasi untuk melakukan perampasan terhadap kapal-kapal yang melintas serta pembunuhan terhadap awak kapal. Aktivitas tersebut secara langsung mengganggu keamanan pelayaran di sekitar Pantai Barat Sumatra dan mengancam jalur perdagangan internasional yang melintasi kawasan tersebut .[78]

Dalam percakapan resmi, komandan De Haai menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan untuk melakukan kunjungan kehormatan atas nama pemerintah Hindia Belanda dan memberikan penghormatan kepada bendera Aceh. Namun, Sultan segera menanggapi dengan nada tegas dan emosional, menegaskan bahwa tidak adanya surat resmi dari Gubernur Jenderal membuat kunjungan tersebut tidak sesuai dengan adat Aceh. Ia menyatakan bahwa hingga saat itu belum pernah disepakati perdamaian resmi antara Aceh dan pemerintah Belanda,

[77]. Koloniaal Verslag van 1852. (1852). 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij, hlm. 89–90

[78]. Schrieke, B.J.O. (1919). *De betrekkingen tusschen Nederland en Atjeh van 1824 tot 1873. 's-Gravenhage*: Martinus Nijhoff, hlm. 56–58.

sehingga kehadiran kapal perang Belanda di wilayahnya dianggap tidak jelas landasan politiknya.[79]

Pernyataan Sultan tersebut mencerminkan posisi Aceh yang memandang hubungan antarnegara harus dilandasi kesetaraan dan komunikasi tertulis resmi antara penguasa tertinggi. Bagi Sultan, percakapan lisan tanpa dokumen tertulis tidak memiliki kekuatan politik, bahkan dianggap "angin belaka". Ia secara terbuka memperingatkan bahwa meskipun kunjungan kali ini akan diperlakukan secara bersahabat, ia tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal Belanda di masa mendatang apabila tidak ada kesepakatan formal yang mengikat.[80]

Dalam kelanjutan audiensi tersebut, Sultan Aceh menanggapi penjelasan komandan De Haai dengan nada yang semakin sinis. Ia menyatakan bahwa seluruh pasukan bersenjata yang hadir sengaja dikumpulkan sebagai bentuk penghormatan, seraya menyampaikan keheranannya karena pihak Belanda datang tanpa pengawal bersenjata. Sikap ini menunjukkan bahwa Sultan mengharapkan sebuah pertemuan yang setara dalam kerangka kekuasaan, bukan kunjungan simbolik semata. Ia kemudian menanyakan secara langsung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh jawaban tertulis dari pemerintah Batavia, serta apakah komandan De Haai akan segera kembali ke pusat pemerintahan kolonial. Ketika dijelaskan bahwa pelayaran akan dilanjutkan ke Padang dan

[79]. Dagh-Register van Atjeh 1872–1873, nomor berkas 45/1872, hlm. 31

[80]. P. de Boer, *Geschiedenis van Atjeh, Jilid II*, (Batavia: Percetakan Pemerintah, 1918), hlm. 143.

waktu tanggapan tidak dapat dipastikan, Sultan mengakhiri pertemuan secara sepihak dengan mempersilakan rombongan Belanda meninggalkan istana.[81]

Setelah rombongan kembali ke kapal, juru bahasa yang sebelumnya diminta tetap tinggal di istana menyampaikan suasana yang berkembang setelah kepergian mereka. Menurut keterangannya, Sultan dengan nada marah mempertanyakan di hadapan para pembesar dan kerumunan rakyat apakah cara Belanda menjalin "persahabatan" seperti itu dapat dianggap tulus. Beberapa tokoh istana, terutama seorang mantan serang yang diketahui pernah terlibat dalam pembelotan awak kapal sipil Belanda, secara terbuka menyatakan bahwa kedatangan kapal perang Belanda hanyalah dalih untuk mengintai dan mempersiapkan perampasan wilayah Aceh. Pernyataan tersebut disambut oleh teriakan kebencian dari massa bersenjata yang hadir.[82]

Lebih lanjut, juru bahasa menegaskan bahwa situasi audiensi sejak awal telah disusun dalam suasana permusuhan, dan bahwa sikap hati-hati komandan De Haai yang tidak mengeluarkan pernyataan provokatif sangat menentukan terhindarnya bentrokan terbuka. Sultan bahkan menyampaikan pesan agar disampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa ia menuntut pengembalian Singkel dan Baros, serta mengklaim hak atas setengah wilayah Nias. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Sultan menyatakan kemungkinan akan mengambil kembali wilayah-wilayah tersebut dengan kekuatan senjata di masa mendatang. Dalam waktu yang sama, juru bahasa juga diperingatkan bahwa

[81].C. Snouck Hurgronje, *Orang-Orang Aceh, terjemahan A. Hassan, Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), hlm. 190.

[82]. *Ibid*. hlm.191

meskipun dirinya dijamin keselamatannya, nasib kapal dan awak Belanda tidak dapat dipastikan.[83]

Menanggapi situasi tersebut, komandan De Haai segera meningkatkan kesiapsiagaan di kapal dan memperketat penjagaan. Pada keesokan harinya, sabandar Aceh datang ke kapal membawa sejumlah bahan makanan dan kebutuhan logistik yang telah dipesan, meskipun dengan harga yang relatif tinggi. Dalam kunjungan tersebut, komandan Belanda secara sengaja memperlihatkan seluruh persenjataan kapal, termasuk baterai meriam, jenis proyektil, serta mengadakan demonstrasi kesiapan tempur dengan mengerahkan awak kapal di bawah senjata. Tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya memperlihatkan kekuatan militer secara terbuka, namun tetap berada dalam kerangka kunjungan resmi.[84]

Komandan De Haai menegaskan kembali bahwa adat Belanda tidak mengenal praktik “membeli persahabatan” melalui hadiah-hadiah mahal, dan meminta sabandar menyampaikan pesan tersebut kepada Sultan. Ia juga menyatakan niatnya untuk segera meninggalkan Aceh dalam satu atau dua hari, serta menanyakan apakah Sultan masih memiliki pesan tambahan untuk disampaikan kepada pemerintah kolonial. Percakapan ini menandai berakhirnya

[83]. P. de Boer. (1918). Geschiedenis van Atjeh, Jilid II. Halaman 146–148. Batavia: Percetakan Pemerintah.

(Catatan: Bagian ini memuat laporan lengkap juru bahasa tentang suasana permusuhan sejak awal, kehati-hatian komandan Belanda, tuntutan tegas Sultan agar Singkel dan Baros dikembalikan serta mengklaim separuh wilayah Nias, ancaman penggunaan kekuatan senjata, dan peringatan bahwa keselamatan kapal Belanda tidak terjamin)

[84].Graham Irwin, "*Nineteenth Century Borneo: A Study in Diplomatic Rivalry*," VKI 15 (1955), hlm. 151-156

kunjungan diplomatik yang berlangsung dalam suasana tegang, penuh kecurigaan, dan nyaris berujung pada konflik terbuka.[85]

Pada tahun berikutnya, fregat Prins Frederik der Nederlanden dikirim ke perairan Aceh dengan membawa seorang pejabat sipil, J. F. Nieuwenhuizen. Misi ini tidak hanya bertujuan menunjukkan kehadiran militer, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi mendetail mengenai kondisi wilayah, potensi perdagangan, dan keamanan pelayaran. Nieuwenhuizen secara khusus diberi tugas untuk membuka kemungkinan perundingan politik dengan Aceh, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Traktat London 1824.[86]

Berbeda dengan kunjungan sebelumnya, rombongan kali ini dilengkapi dengan surat resmi untuk Sultan Aceh, guna menghindari perlakuan tidak bersahabat sebagaimana dialami komandan De Haai. Sultan menyambut inisiatif tersebut dengan lebih terbuka dan secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah Hindia Belanda melalui suatu perjanjian resmi. Ia bahkan mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal tertanggal 28 April 1856 yang secara tegas mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pendekatan diplomatik. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, Sultan juga mengirimkan surat kepada Gubernur Singapura dengan nada yang

[85]. F.G Hoffman, *Verhaal der Expeditie van 1857*, hlm. 565

[86]. W.G. Maxwell dan W.S. Gibson , *Treaties and Engagements the Malay States and Borneo*, (London, 1924), hlm. 8-16.

bermusuhan terhadap Belanda, sebuah tindakan yang menunjukkan ambiguitas politik dan strategi diplomasi ganda dalam menghadapi kekuatan kolonial.[87]

Berdasarkan laporan para komisaris dan pertimbangan Gubernur Sumatra's Westkust, pemerintah Hindia Belanda sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan militer semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan keamanan pelayaran dan aktivitas perompakan di perairan Aceh. Oleh karena itu, dipilihlah jalur diplomasi melalui perumusan sebuah traktat yang diharapkan mampu menata kembali hubungan politik sekaligus menekan praktik zeeroof, strandroof, dan menschenroof yang selama ini meresahkan perdagangan regional.[88]

Rancangan traktat tersebut memuat sejumlah poin utama, antara lain: pembukaan akses perdagangan, pelayaran, dan hak tinggal bagi masing-masing pihak; kewajiban bersama untuk menanggulangi pembajakan laut dan perompakan pantai; penghapusan klaim-klaim lama yang saling membebani hubungan, khususnya kasus perampasan schooner Dolphijn tahun 1837 serta tuntutan balik Sultan Aceh terkait penyitaan kapal-kapal budak pada 1825; serta pengakuan resmi terhadap Gubernur Sumatra's Westkust sebagai wakil sah pemerintah Hindia Belanda dalam hubungan dengan Aceh.[89]

Melalui Indisch Besluit tertanggal 2 Maret 1857 (No. 37), Gubernur Sumatra's Westkust diperintahkan untuk berangkat ke Aceh dengan menggunakan kapal uap kerajaan Amsterdam guna melakukan perundingan langsung. Misi ini

[87]. Bijdragen tot de Taal Land- en, *Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (BKI), Deel 43* (1894), hlm. 102–105.

[88]. E.B. Kielstra, *Atjeh en de verhouding tot Nederland van 1819–1824 en 1831–1873*, (1894), hlm. 105–107

[89] Anthony Reid, *Histories of Sumatra* (Singapore: NUS Press, 2005), hlm. 120–124.

disertai penyerahan surat resmi dan hadiah dari Gubernur Jenderal kepada Sultan Aceh, sebuah langkah yang menunjukkan penyesuaian Belanda terhadap adat diplomasi lokal yang sebelumnya sering menjadi sumber kesalahpahaman.[90]

Meskipun proses perundingan berlangsung dengan alot dan diwarnai ketegangan yang oleh pihak Belanda lebih dipahami sebagai akibat perbedaan adat dan tingginya konsep kehormatan Sultan pada akhirnya traktat berhasil ditandatangani pada 30 Maret 1857. Traktat tersebut kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal melalui keputusan 9 Mei 1857 dan disampaikan kepada Staten-Generaal di Belanda sebagai dokumen resmi negara.[91]

Isi traktat menegaskan beberapa prinsip fundamental. Pasal pertama menyatakan adanya perdamaian, persahabatan, dan hubungan baik yang bersifat permanen antara pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Aceh beserta para penerusnya. Pasal kedua dan ketiga mengatur kesetaraan hak perdagangan, pelayaran, perlindungan hukum, dan perlakuan istimewa bagi para pedagang dan pelaut kedua belah pihak, sejajar dengan bangsa asing yang paling diistimewakan (most favoured nation). Ketentuan ini secara eksplisit bertujuan untuk mendorong stabilitas perdagangan dan mengurangi praktik perompakan yang kerap muncul akibat ketidakjelasan status hukum pelaut dan pedagang asing.[92]

Lebih jauh, traktat tersebut juga memuat komitmen bersama untuk menindak pembajakan laut, perampokan pantai, dan perdagangan manusia, yang dalam arsip kolonial selama dekade-dekade sebelumnya kerap dilekatkan pada

[90]. Surat Keputusan Hindia Belanda Tanggal 2 Maret 1857 (No. 37),
[91] .Surat Keputusan Hindia Belanda tanggal 9 Mei 1857 (No. 7), hlm. 1- 4.
[92]. *Ibid.*

kelompok-kelompok pelaut Aceh. Dengan demikian, pembajakan laut tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai persoalan kriminal, melainkan sebagai isu politik dan diplomatik yang memerlukan pengaturan antarnegara.[93]

Namun demikian, lahirnya traktat 1857 tidak serta-merta menghapus ketegangan di perairan Aceh dan Pantai Barat Sumatra. Ambiguitas sikap Sultan yang di satu sisi menyatakan keinginan berdamai, namun di sisi lain masih mempertahankan posisi tawar politik terhadap kekuatan kolonial menunjukkan bahwa stabilitas maritim di pantai barat Sumatra tetap rapuh. Traktat ini lebih tepat dipahami sebagai upaya awal Belanda untuk mengalihkan persoalan bajak laut dari ranah kekerasan terbuka menuju mekanisme kontrol diplomatik, sebuah langkah yang kelak menjadi dasar bagi intervensi kolonial yang lebih luas pada paruh kedua abad ke-19.[94]

Meskipun traktat Aceh Belanda tahun 1857 secara formal memuat prinsip perdamaian, persahabatan, dan kerja sama dalam bidang perdagangan serta keamanan laut, dalam praktiknya perjanjian ini lebih menyerupai sebuah verbond van vriendschap en handel tanpa substansi politik yang nyata. Arsip kolonial secara tegas menyatakan bahwa dalam ketentuan traktat tersebut "geen spoor van eenig streven" dapat ditemukan untuk melaksanakan kewajiban Belanda terhadap Inggris sebagaimana disepakati dalam Traktat London 1824, khususnya terkait jaminan keamanan perdagangan dan pelayaran di kawasan Aceh.[95] Dengan

[93]. Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Aceh, 30 Maret 1857, Pasal 5–7, hlm. 5–6.

[94].*Ibid*. hlm, 7

[95]. *Op Cit.* W.G. Maxwell dan W.S. Gibson, hlm. 23

demikian, traktat 1857 tidak dirancang sebagai instrumen untuk memperluas atau menegaskan pengaruh Belanda di Aceh, melainkan hanya sebagai kesepakatan normatif yang minim daya paksa.

Ketiadaan pengaruh nyata Belanda di Aceh tercermin dari tidak adanya satu pun pasal yang memberikan hak intervensi, pengawasan, atau mekanisme pelaksanaan terhadap pelanggaran perjanjian. Meskipun Pasal 5 menegaskan komitmen bersama untuk menindak *zeeroof dan menschenroof*, ketentuan tersebut sepenuhnya bergantung pada kemauan Sultan Aceh sebagai penguasa berdaulat. Pemerintah kolonial sendiri mengakui bahwa traktat ini "geenerlei bepaling die ons eenigen invloed in Atjeh geeft", sehingga sejak awal hampir mustahil bagi Belanda untuk menjamin keamanan pelayaran secara berkelanjutan.[96]

Pengakuan implisit atas kegagalan traktat tersebut tampak jelas dalam arsip kolonial yang menyatakan bahwa "*er is dan ook nimmer eenig nut, hoe gering ook, van ondervonden*".[97] Pernyataan ini menunjukkan kesadaran internal pemerintah kolonial bahwa diplomasi tanpa kekuatan struktural tidak mampu mengatasi persoalan bajak laut di perairan Aceh. Traktat 1857 tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam pola serangan terhadap kapal-kapal Eropa maupun dalam relasi kekuasaan antara Aceh dan Belanda.

Sebagai kompensasi atas kelemahan traktat, pemerintah Hindia Belanda justru mempertahankan kebijakan militer maritim yang telah dirumuskan

[96] . Geenerlei bepaling die ons eenigen invloed in Atjeh geeft". Lihat juga dalam: F.W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indië (Amsterdam: Elsevier, 1938), Vol. 3, hlm. 210.

[97] . F.W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, Vol. 3 (Amsterdam: Elsevier, 1938), hlm. 212.

sebelumnya. Melalui Indisch Besluit 9 Mei 1857, ketentuan dalam keputusan rahasia 14 April 1854 (lit. P) tetap diberlakukan, yakni kewajiban mengirimkan kapal perang berukuran besar untuk mengunjungi pelabuhan-pelabuhan lada Aceh menjelang akhir setiap tahun. Kunjungan ini secara eksplisit dinyatakan memiliki "uitsluitend doel", yaitu demonstrasi kekuatan dan pengawasan simbolik, bukan implementasi traktat secara substantif.[98]

Fakta bahwa pada tahun 1858 stormkorvet Medusa dikirim ke Aceh untuk menukar naskah traktat, sementara pada 1859 dan 1860 tidak ada kapal yang dikirim, semakin menegaskan inkonsistensi kebijakan kolonial. Ketidakteraturan ini memperlihatkan bahwa keamanan maritim di wilayah Aceh masih dipandang sebagai persoalan situasional, bukan sebagai tanggung jawab struktural yang diatur secara sistematis melalui perjanjian internasional.[99]

Dengan demikian, traktat Aceh–Belanda 1857 lebih tepat dipahami sebagai produk kompromi diplomatik yang lemah, yang gagal menjembatani kepentingan kolonial Belanda dengan realitas kedaulatan Aceh. Dalam konteks aktivitas bajak laut, perjanjian ini tidak menghapus praktik zeeroof, melainkan justru memperlihatkan keterbatasan pendekatan hukum dan diplomasi kolonial dalam menghadapi dinamika maritim masyarakat Aceh. Kegagalan ini kemudian menjadi salah satu dasar legitimasi bagi pergeseran kebijakan Belanda menuju intervensi militer yang lebih terbuka pada dekade-dekade berikutnya.

[98].Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 165-168.

[99]. Ibrahim Alfian, Perang Rakyat Aceh (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 55-58.

Pengiriman kembali kapal perang Belanda ke Aceh pada tahun 1861 tidak didorong oleh agenda diplomatik maupun patroli anti-bajak laut, melainkan oleh sengketa penyitaan dua kapal dagang di bawah bendera Belanda, Sassah dan Johanna, yang berasal dari Priaman. Kedua kapal tersebut ditahan oleh salah seorang wali (voogd) yang ditunjuk Sultan Aceh atas kepala wilayah Kloeang yang masih di bawah umur, Radja Obdah. Penahanan ini dilakukan atas dasar klaim utang lama antara seorang pedagang Priaman bernama Peto Majeh dengan Radja Obdah, yang menurut pengakuan bersumber dari perjanjian antarkeluarga sekitar 50–60 tahun sebelumnya. Kapal-kapal tersebut kemudian dibawa ke Aceh dan, atas saran Sultan, dipindahkan secara diam-diam dari pelabuhan.[100]

Kasus ini segera menimbulkan reaksi dari para pemilik kapal yang mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Hindia Belanda. Melalui Indisch Besluit 22 Januari 1861, Gubernur Sumatra's Westkust diberi kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban Sultan Aceh, namun dengan penekanan kuat pada prinsip gematigdheid (kehati-hatian). Pemerintah kolonial secara eksplisit melarang tuntutan yang melampaui kemampuan para kepala lokal atau yang berpotensi mengganggu hubungan dagang dengan Aceh. Sikap ini kembali memperlihatkan watak defensif kebijakan Belanda pasca-traktat 1857, yang lebih mengedepankan stabilitas semu daripada penegakan hukum maritim yang tegas.[101]

[100]. Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terjemahan. Masri Maris,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). hlm. 104–106.

[101]. Surat Keputusan Hindia Belanda 22 Januari Tahun 1861, No. 2

Untuk tujuan tersebut, stoomkorvet Groningen dikirim ke Aceh dengan membawa seorang pejabat kolonial, H. A. Mess, yang berpengalaman di wilayah Singkel. Namun setibanya di Aceh, Sultan telah lebih dahulu memberhentikan Radja Obdah dari jabatannya. Sultan mengakui bahwa tuntutan ganti rugi para pemilik kapal adalah sah, tetapi berusaha mengalihkan tanggung jawab pembayaran kepada utang Peto Majeh terhadap Radja Obdah. Upaya ini kembali menggambarkan pola penghindaran tanggung jawab struktural oleh otoritas Aceh, dengan melempar persoalan kepada relasi personal dan genealogis yang sulit diverifikasi oleh hukum kolonial.[102]

Perkembangan selanjutnya justru memperlihatkan kebuntuan total. Melalui keputusan 9 Oktober 1861, Gubernur Sumatra's Westkust diperintahkan untuk menagih utang Peto Majeh demi kepentingan pemilik kapal. Akan tetapi, diketahui bahwa Peto Majeh telah wafat setahun sebelumnya tanpa meninggalkan harta warisan, sementara para kerabatnya tidak mengetahui adanya utang tersebut. Dalam laporan resminya, gubernur menyatakan bahwa prinsip gematigdheid yang selama ini dianut telah mencapai batas maksimalnya. Menurutnya, tanpa tuntutan yang lebih tegas terhadap penghormatan traktat 1857, perjanjian tersebut tidak akan pernah menghasilkan tujuan yang diharapkan.[103]

Lebih jauh, gubernur menilai bahwa tindakan Sultan Aceh tidak mencerminkan penghormatan yang layak terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Para radja bawahan di bawah kedaulatan Sultan dinilai bertindak hampir

[102]. Archief van het Ministerie van Koloniën, Afdeling Atjeh, no. 214 (1858-1862), Nationaal Archief, Den Haag.

[103] . *Ibid.*

sepenuhnya independen dan hanya mematuhi traktat sejauh sesuai dengan kepentingan mereka sendiri atau sejauh mereka takut akan tindakan balasan (représsailles). Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Sultan tidak memiliki kendali efektif atas elite lokal pesisir sebuah faktor yang sangat relevan dalam menjelaskan keberlanjutan perompakan dan penyitaan kapal di perairan Aceh.[104]

Atas dasar pertimbangan tersebut, melalui Indisch Besluit 28 Januari 1862, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk terlebih dahulu membayar ganti rugi sebesar f 2.640 kepada pemilik kapal Sassah dan Johanna. Keputusan ini disertai instruksi untuk kembali mengirim kapal perang tahunan ke pelabuhan-pelabuhan lada Aceh guna menekan Sultan agar mengganti kerugian tersebut kepada pemerintah kolonial. Dalam surat yang harus disampaikan kepada Sultan, gubernur diminta menegaskan bahwa apabila pembayaran terus ditunda, pemerintah colonial meskipun enggan dapat terpaksa "mencari keadilan dengan tangannya sendiri", sebuah ancaman halus yang secara implisit membuka kemungkinan intervensi militer. Namun demikian, surat tersebut juga harus disusun dengan kehati-hatian ekstrem, karena perang dengan Aceh tetap dianggap sebagai opsi terakhir yang sebisa mungkin dihindari.[105]

Insiden Sassah dan Johanna memperlihatkan secara konkret bagaimana keamanan pelayaran di sekitar Aceh tidak hanya terganggu oleh perompakan

[104] . E.S. De Kleck, *De Atjeh Oorlog Vol. I,* (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912), hlm. 229-232

[105] . Nationaal Archief, Den Haag, koleksi Ministerie van Koloniën, Afdeling Atjeh, No. 214. Surat Keputusan 28 Januari 1862, No. 1.

terbuka, tetapi juga oleh praktik penyitaan, pemaksaan klaim lama, dan lemahnya otoritas pusat Sultan atas elite lokal. Dalam konteks historiografi bajak laut, kasus ini menegaskan bahwa batas antara sengketa ekonomi, kekuasaan lokal, dan zeeroof sering kali kabur dalam narasi kolonial. Belanda cenderung menafsirkan setiap ancaman terhadap kapal berbendera Eropa sebagai pelanggaran traktat dan potensi perompakan, sementara struktur politik Aceh sendiri tidak menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah atau menyelesaikan konflik maritim semacam ini. Kondisi inilah yang kemudian menjadi justifikasi utama bagi perubahan arah kebijakan Belanda dari diplomasi hati-hati menuju pendekatan koersif pada dekade berikutnya.

Kegagalan Sultan Aceh memenuhi tuntutan ganti rugi atas penyitaan kapal Sassah dan Johanna mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk mulai mempertimbangkan langkah yang lebih keras. Dalam instruksi lanjutan, dinyatakan secara eksplisit bahwa apabila reklamasi kedua kepada Sultan kembali tidak membuahkan hasil, maka harus diajukan usulan yang beralasan untuk menegakkan kehormatan bendera Belanda melalui tindakan réprésaille. Ketentuan ini menandai perubahan penting dalam sikap kolonial: dari diplomasi berhati-hati menuju kemungkinan penggunaan tekanan koersif sebagai sarana penegakan hukum maritim.[106]

Sebagai pelaksanaan kebijakan tersebut, dikirimlah kapal perang Bromo di bawah komando Kapitein-Luitenant Brutel de la Rivière, dengan Asisten Residen

[106] . Sudirman, *Bandara aceh dalam siklus perdagangan internasional 1500-1873*.(Balai pelestarian sejarah dan nilai tradisional Banda Aceh). Hlm 103-109

H. A. Mass turut serta dalam misi tersebut. Namun demikian, tuntutan ganti rugi tetap tidak memperoleh hasil konkret. Baik Gubernur Sumatra's Westkust maupun komandan Bromo berpendapat bahwa kegagalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh niat buruk Sultan, melainkan lebih oleh kemiskinan dan ketidakmampuannya untuk memaksakan kehendak atas para penguasa lokal di bawah kekuasaannya. Penilaian ini kembali menegaskan lemahnya otoritas politik Sultan Aceh, khususnya dalam konteks pengamanan perdagangan dan pelayaran internasional.[107]

Menanggapi hal tersebut, pada 23 Desember 1862 Gubernur-Jenderal menyatakan kesediaannya untuk membicarakan pengaturan batas wilayah melalui perundingan, dengan mengusulkan agar wakil Sultan Aceh dikirim untuk bertemu Residen Riouw. Dalam surat yang sama, isu ganti rugi kapal Sassah dan Johanna kembali disinggung. Pemerintah kolonial menyatakan harapan bahwa Sultan akan memenuhi kewajiban tersebut "apabila keadaannya memungkinkan", seraya menegaskan bahwa Sultan dianggap bertanggung jawab karena memaksa Radja Obdah secara langsung dapat dipandang sebagai tindakan permusuhan terhadap Aceh. Sikap ini menunjukkan ambivalensi Belanda: di satu sisi ingin menegakkan haknya, di sisi lain masih berusaha menghindari eskalasi terbuka dengan Aceh.[108]

Namun, surat tersebut tidak segera sampai ke tangan Sultan karena berbagai kendala teknis, termasuk kondisi buruk kapal perang yang bertugas di Sumatra's Westkust. Akibatnya, komunikasi resmi ini baru dapat disampaikan

[107] . *Ibid. hlm.* 110
[108] . *Op Cit.* Ibrahim Alfian. Hlm 70-72

pada September 1863, suatu penundaan yang semakin memperpanjang ketidakpastian hubungan antara kedua pihak. Keterlambatan ini turut memperlemah efektivitas diplomasi kolonial dan memberi ruang bagi berlanjutnya ketegangan di kawasan perairan strategis Sumatra.[109]

Dalam konteks yang lebih luas, perlu dicatat bahwa hingga tahap ini hubungan Belanda–Aceh terutama dipengaruhi oleh interaksi di Pantai Barat Sumatra. Namun memasuki awal 1860-an, persoalan di Pantai Timur Sumatra mulai memegang peranan yang tidak kalah penting. Pada tahun 1858, Pemerintah Hindia Belanda telah menandatangani traktat dengan Sultan dan para penguasa Siak Sri Indrapura, yang menempatkan kerajaan tersebut beserta wilayah-wilayah bawahannya di bawah kedaulatan Belanda. Traktat ini secara eksplisit mencantumkan sejumlah daerah di utara Siak termasuk Tana Putih, Bilah, Asahan, Deli, Langkat, dan kawasan pesisir lainnya yang secara geografis dan politis berdekatan dengan wilayah pengaruh Aceh.[110]

Kembalinya Belanda ke Pantai Timur Sumatra setelah penarikan diri pada 1841 didorong oleh kekhawatiran bahwa kawasan tersebut akan jatuh ke tangan kekuatan asing apabila Belanda tidak segera menegaskan kekuasaannya. Langkah ini, bagaimanapun, memicu perlawanan tidak langsung dari pengaruh Inggris di Straits Settlements, yang menganggap kepentingan dagang mereka terancam.

[109] . Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 183-184.

[110]. Tengku Luckman Sinar, *Kesultanan Deli Dalam Sejarah 1632–1946* (Medan: Yayasan Kesultanan Deli, 1999), hlm. 45-50.

Persaingan ini menimbulkan serangkaian ketegangan diplomatik yang baru mereda setelah penandatanganan Traktat Sumatra tahun 1871.[111]

Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa persoalan Aceh tidak dapat dipahami secara terpisah dari perkembangan di Pantai Timur Sumatra dan rivalitas kekuatan kolonial di Selat Malaka. Lemahnya kontrol Sultan Aceh atas elite lokal, kegagalan penegakan traktat 1857, serta meluasnya kepentingan strategis Belanda di Sumatra secara keseluruhan, menjadikan Aceh semakin dipandang sebagai sumber ketidakstabilan maritim. Dalam kerangka inilah, tindakan perompakan, penyitaan kapal, dan ketidakamanan pelayaran terus direproduksi dalam wacana kolonial sebagai justifikasi bagi intervensi yang lebih keras pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan keseluruhan perkembangan sejak 1824 hingga awal 1860-an, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kelompok yang oleh arsip kolonial Belanda disebut sebagai zeerover atau bajak laut merupakan pelaku kejahatan maritim dalam pengertian yang sama. Sebagian memang melakukan pembajakan, perampokan kapal, dan perdagangan budak yang merugikan masyarakat maupun pelayaran internasional. Namun, sebagian lainnya merupakan kelompok-kelompok lokal yang mempertahankan wilayah, jalur perdagangan, dan otonomi politiknya dari penetrasi kolonial Belanda. Dalam konteks tersebut, istilah "bajak laut" kerap digunakan sebagai konstruksi politik kolonial untuk melegitimasi

[111] . Treaty between Great Britain and the Netherlands, relating to the Island of Sumatra, signed at The Hague, 2 November 1871. Lihat juga Staatsblad van Nederlandsch-Indië tahun 1872, No. 116.

operasi militer dan perluasan kekuasaan di Pantai Barat maupun Pantai Timur Sumatra.

Oleh karena itu, aktivitas maritim di kawasan Aceh dan Pantai Barat Sumatra pada paruh pertama abad ke-19 lebih tepat dipahami sebagai perpaduan antara tindakan kriminal di laut, perlawanan terhadap kolonialisme, serta konflik perebutan kekuasaan antarpenguasa lokal. Kompleksitas inilah yang kemudian dijadikan pemerintah Hindia Belanda sebagai dasar untuk mengubah pendekatan dari diplomasi menuju intervensi militer terbuka, yang akhirnya berpuncak pada pecahnya Perang Aceh tahun 1873.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN BAJAK LAUT DAN STRATEGI BELANDA DALAM MENGHADAPINYA

A. FAKTOR-FAKTOR PENYBAB KEMUNCULAN AKTIVITAS BAJAK LAUT

a) Faktor Ekonomi

Aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada paruh pertama abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur ekonomi yang dipaksakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Arsip-arsip kolonial sering kali menjelaskan

perompakan sebagai akibat dari “watak liar” atau “ketiadaan disiplin” masyarakat pesisir, namun pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tersebut justru menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kolonial memainkan peranan penting dalam menciptakan kondisi ketidakstabilan yang mendorong munculnya aktivitas bajak laut. Dengan demikian, perompakan perlu dipahami sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, bukan semata-mata sebagai tindakan kriminal.[112]

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memicu keresahan masyarakat pesisir adalah kebijakan fiskal kolonial, khususnya pajak dan pungutan pasar (*belasting op de bazars*). Dalam arsip Belanda dijelaskan bahwa pajak bazar sebenarnya hanya diberlakukan di Padangsche Bovenlanden dan secara resmi dimaksudkan sebagai pengganti pajak tanah yang belum dapat dilaksanakan. Namun, sumber yang sama juga mengakui bahwa persoalan utama bukan terletak pada besaran pajak, melainkan pada cara pemungutannya. Pajak tersebut dipungut secara koersif oleh aparat militer melalui perantara lokal (djajang-sekars) yang bertindak sewenang-wenang, bahkan terhadap bazar perempuan. Cara pemungutan yang bersifat militeristik ini menimbulkan rasa terhina dan kemarahan di kalangan penduduk, sehingga memperdalam jurang antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal.[113]

Kondisi ekonomi semakin memburuk akibat monopoli dan kontrol perdagangan yang dijalankan oleh Belanda. Jalur-jalur perdagangan tradisional yang sebelumnya bersifat terbuka dan berbasis jaringan lokal–regional mulai

[112] Ann Laura Stoler, *Race and the Education of Desire* (Durham: Duke University Press, 1995), hlm. 40-45

[113] . *Ibid.* Hlm. 47

dibatasi dan diarahkan untuk kepentingan kolonial. Perdagangan yang tidak berada di bawah pengawasan Belanda kemudian dicap sebagai penyelundupan, sementara pelaku-pelakunya diberi label perompak atau bajak laut. [114] Dalam konteks ini, aktivitas bajak laut di perairan Pantai Barat Sumatra dapat dipahami sebagai bagian dari upaya masyarakat pesisir mempertahankan akses ekonomi terhadap perdagangan maritim yang telah lama menjadi sumber penghidupan mereka.

Selain itu, arsip kolonial juga memperlihatkan ketidakmampuan negara kolonial menyediakan infrastruktur ekonomi dasar, terutama dalam hal logistik dan transportasi. Dalam korespondensi Letnan Kolonel Elout, terdapat kritik keras terhadap cara Belanda menjalankan operasi militer tanpa dukungan sistem transportasi yang memadai. Elout secara eksplisit membandingkan praktik Belanda dengan tentara Inggris di India yang didukung oleh sistem kontraktor logistik sipil. Kegagalan Belanda dalam mengelola transportasi dan suplai ini tidak hanya melemahkan operasi militer, tetapi juga membebani masyarakat lokal yang dipaksa menyediakan tenaga, bahan makanan, dan sarana angkut. Tekanan ekonomi semacam ini memperparah ketidakpuasan dan mendorong sebagian kelompok masyarakat pesisir beralih pada aktivitas perompakan sebagai strategi bertahan hidup.[115]

Lebih jauh, kebijakan ekonomi kolonial turut melemahkan posisi elite lokal. Reformasi administratif dan ekonomi yang dilakukan Belanda secara

[114] H. I. J. L. RIDDER DE STUERS, Her Werk van den Luitenant-Klonel Lange, NERLANDSCH . LEGER TER WESTKUST VAN SUMATRA."ZALT-BOMMEL, JOH. NOMAN en ZOON. 1853.

[115] . *Ibid.*

sistematis mengurangi kewenangan para penghulu dan kepala adat, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan perdagangan. Arsip Belanda sendiri mengakui bahwa salah satu "grief der bevolking" (keluhan utama penduduk) adalah menyusutnya otoritas tradisional elite lokal.[116]

Dari sudut pandang historiografi kritis, cara Belanda menarasikan faktor ekonomi ini sarat dengan bias orientalis. Arsip kolonial cenderung menekankan "keserakahan", "fanatisme", atau "ketidakdewasaan politik" penduduk lokal, sembari menutupi peran kebijakan kolonial dalam menciptakan kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi sumber daya, dan ketidakamanan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Edward Said, orientalisme bekerja dengan mengalihkan sebab-sebab struktural menjadi persoalan moral dan kultural masyarakat Timur.[117]

Dengan demikian, faktor ekonomi dalam munculnya aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pajak, monopoli perdagangan, kegagalan penyediaan infrastruktur, serta pelemahan elite lokal oleh pemerintah kolonial. Perompakan dalam konteks ini merupakan bentuk resistensi ekonomi terhadap dominasi kolonial, sekaligus strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan drastis terhadap sistem ekonomi maritim yang telah lama mereka kenal.

Perlawanan masyarakat lokal di Pantai Barat Sumatra pada awal abad ke-19, termasuk keterlibatan kelompok Padri dan elite Melayu, dalam arsip kolonial

[116]. Jaarverslag van den Resident van Sumatra's Westkust (berbagai tahun, khususnya 1820-1830an). Laporan-laporan ini sering menyebutkan "grief der bevolking" akibat campur tangan berlebihan dalam urusan adat dan kepemimpinan lokal.

[117]. Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 42

Belanda sering digambarkan sebagai akibat dari watak curiga, fanatisme, dan ambisi kekuasaan. Namun pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tersebut justru menunjukkan bahwa ketegangan ekonomi dan ketidakamanan material merupakan latar utama dari resistensi yang kemudian diberi label sebagai ancaman keamanan malah kebanyakan dari mereka di cap sebagai bajak laut bagi orang-orang pesisir.[118]

Kecurigaan masyarakat lokal terhadap Belanda tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berkaitan erat dengan upaya kolonial untuk memaksakan syarat-syarat baru dalam pengelolaan ekonomi dan kekuasaan, baik melalui kontrak politik, monopoli dagang, maupun reformasi administratif. Sumber kolonial sendiri mengakui bahwa situasi ini mengikuti pola yang "selalu terjadi" ketika kekuasaan luar mencoba memberlakukan tatanan baru atas masyarakat lokal. [119]

Dari sudut pandang kritik orientalis, narasi kolonial tentang Padri, elite Melayu, dan perlawanan lokal memperlihatkan kecenderungan untuk mengkulturalisasi persoalan ekonomi. Ketimpangan material, pajak yang menekan, gangguan terhadap jaringan perdagangan, dan perebutan sumber daya direduksi menjadi persoalan watak Timur: licik, fanatik, dan tidak dapat dipercaya. Sebagaimana dikemukakan Ann Laura Stoler, arsip kolonial bukan

[118]. Wikipedia, "Perang Padri", diakses 14 Juni 2026, link. https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Padri.

[119] . Jeanne Cuisinier, "*La guerre des Padri* (1803-1838-1845)", Archives de sociologie des religions, Vol. 4, No. 7, 1959, hlm. 70–88.

sekadar rekaman peristiwa, melainkan instrumen kekuasaan yang menyaring realitas sesuai dengan kepentingan kolonial.[120]

b) Faktor Politik

Jika faktor ekonomi menjelaskan mengapa masyarakat pesisir terdorong memasuki dunia perompakan, maka faktor politik menjelaskan bagaimana kondisi kekuasaan kolonial memungkinkan aktivitas bajak laut berkembang. Pada paruh pertama abad ke-19, Pantai Barat Sumatra berada dalam situasi yang dapat disebut sebagai ruang kekuasaan yang terfragmentasi: Belanda mengklaim kedaulatan, Aceh mempertahankan pengaruh maritimnya, sementara elite lokal Minangkabau dan Padri berjuang mempertahankan otonomi. Dalam ruang kekuasaan yang tidak stabil inilah perompakan tumbuh sebagai praktik politik sekaligus ekonomi.[121]

Arsip kolonial sendiri mengakui bahwa wilayah utara Pantai Barat Sumatra khususnya Tapanuli, Baros, Natal, dan Air Bangis tidak pernah benar-benar berada di bawah kontrol efektif Belanda. Pos-pos kolonial di kawasan ini bersifat lemah, terisolasi, dan sering bergantung pada aktor lokal untuk bertahan. Laporan Residen Elout tahun 1831–1832 menyebut bahwa orang-orang Aceh "menguasai seluruh perdagangan di wilayah utara" dan menjadikan Baros sebagai pusat barang selundupan, Nias sebagai lokasi perdagangan budak, serta Pulau

[120]. Ann Laura Stoler, Race and the Education of Desire (Durham: Duke University Press, 1995), hlm. 33

[121]. H. I. J. L. RIDDER DE STUERS, Her Werk van den Luitenant-Klonel Lange, NERLANDSCH . LEGER TER WESTKUST VAN SUMATRA."ZALT-BOMMEL, JOH. NOMAN en ZOON. 1853.

Mansalar sebagai sarang perompak.[122] Fakta ini menunjukkan bahwa struktur politik kolonial tidak mampu memonopoli kekuasaan di laut, sehingga kekuasaan maritim justru berada di tangan jaringan Aceh dan sekutunya.

Dalam kondisi seperti ini, bajak laut tidak berdiri di luar politik, melainkan terintegrasi dalam sistem kekuasaan regional. Perahu-perahu perompak Aceh bukan sekadar aktor kriminal, tetapi berfungsi sebagai alat kontrol politik atas jalur perdagangan dan wilayah pesisir. Dengan menguasai laut, jaringan Aceh mampu menekan pos-pos Belanda seperti Tapanuli, Natal, dan Air Bangis hingga berada dalam "keadaan menyedihkan", sebagaimana diakui dalam laporan kolonial. Perompakan, dalam konteks ini, adalah bentuk politik maritim: sarana untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dan simbolik atas laut.[123]

Keterbatasan politik kolonial semakin jelas dalam kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sangat berhati-hati terhadap Aceh. Traktat Inggris–Belanda tahun 1824 secara formal mengakui Aceh sebagai entitas berdaulat, sehingga Belanda tidak dapat secara terbuka melakukan ekspansi militer ke wilayah tersebut. Akibatnya, Belanda hanya diizinkan "mengejar perompak", bukan menantang kekuasaan Aceh itu sendiri. Situasi ini menciptakan zona abu-abu hukum: Aceh tetap dapat melindungi atau menoleransi aktivitas perompakan, sementara Belanda tidak memiliki legitimasi politik untuk menghentikannya secara langsung.[124]

[122]. Laporan Residen Elout kepada Gouverneur-Generaal, 17 Desember 1831; dikutip dalam arsip Sumatra's Westkust, Nationaal Archief Den Haag.

[123]. Tractaat Londen 1824 (Anglo-Dutch Treaty), artikel mengenai Aceh.

[124] . Majoor Michiels, Rapport over den Noordelijken Kust van Sumatra, 6 Februari 1832.

Upaya Belanda untuk menembus jaringan politik Aceh melalui kontrak dengan penguasa lokal seperti Radja Troemon juga gagal. Kontrak tahun 1830 tidak pernah disahkan karena didasarkan pada asumsi keliru mengenai hubungan Troemon dengan Aceh. Kegagalan ini memperlihatkan betapa dangkalnya pemahaman kolonial terhadap struktur politik pesisir. Belanda membayangkan kekuasaan sebagai hierarki teritorial ala Eropa, sementara dunia politik Melayu–Aceh bersifat jaringan maritim yang cair, berbasis loyalitas dagang dan kekuatan laut. Dalam struktur seperti itu, bajak laut justru menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan, bukan penyimpangan darinya.[125]

Kasus pembelotan dan pembakaran kapal Dolphijn (1836–1837) semakin menegaskan lemahnya posisi politik Belanda. Sultan Aceh menolak menyerahkan kapal tersebut tanpa surat resmi dari Gubernur Jenderal, menandakan bahwa Aceh tidak mengakui superioritas langsung Belanda. Bahkan pemerintah kolonial sendiri memilih mengalah demi menghindari perang terbuka. Sikap ini memperlihatkan bahwa Belanda tidak mampu memaksakan kedaulatannya di laut Aceh, sehingga bajak laut dan pelaut pemberontak dapat beroperasi dalam ruang politik yang relatif aman.[126]

Dari perspektif historiografi kritis, cara Belanda menggambarkan situasi ini sarat dengan bias orientalis. Arsip kolonial menarasikan Aceh dan aktor pesisir sebagai “anarkis” dan “tidak beradab”, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kegagalan negara kolonial membangun kedaulatan yang sah. Seperti dikemukakan Ann Laura Stoler, arsip kolonial bukan cermin objektif realitas, melainkan produk

[125] .Staatscourant van Nederlandsch-Indië, 1836–1837,
[126] . *Ibid*

kecemasan negara kolonial yang rapuh. Dalam konteks Pantai Barat Sumatra, narasi tentang bajak laut berfungsi untuk menutupi fakta bahwa Belanda tidak pernah benar-benar berdaulat di laut.[127]

Dengan demikian, faktor politik utama berkembangnya aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra adalah ketiadaan hegemoni negara kolonial. Fragmentasi kekuasaan, pengakuan terhadap kedaulatan Aceh, kegagalan diplomasi kolonial, serta ketergantungan pada aktor lokal menciptakan ruang politik yang memungkinkan perompakan tumbuh sebagai bagian dari sistem kekuasaan regional. Bajak laut bukan sekadar penjahat, tetapi aktor dalam kontestasi politik atas laut, perdagangan, dan kedaulatan.

c) Faktor Budaya

Aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada awal abad ke-19 tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-keagamaan yang berkembang seiring dengan bangkitnya gerakan Padri dan pengaruh Aceh. Dalam arsip kolonial Belanda, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Padri dan jaringan maritim Aceh hampir selalu dijelaskan sebagai akibat dari "fanatisme agama" dan "jihad melawan orang Eropa". Namun, penjelasan semacam ini sesungguhnya mencerminkan cara pandang kolonial yang menyederhanakan konflik menjadi persoalan budaya dan agama semata, sambil mengaburkan dimensi politik dan ekonomi yang lebih mendasar.[128]

[127]. Ann Laura Stoler, "Colonial Archives and the Arts of Governance," Archival Science 2 (2002): 87–109.

[128] Lihat cara Belanda menggambarkan Padri dan Aceh dalam laporan-laporan resmi dalam Koloniaal Verslag dan arsip Residentie Sumatra's Westkust, serta kritik terhadap wacana kolonial dalam Ann Laura Stoler, Colonial Archives and the Arts of Governance, Archival Science 2 (2002), hlm. 87–109.

Gerakan Padri sendiri berakar dari proses reformasi Islam yang dipengaruhi oleh jaringan ulama Minangkabau di Hijaz. Para haji dan ulama yang kembali dari Mekkah membawa gagasan pemurnian (tajdīd) yang menentang praktik adat lama yang dianggap bertentangan dengan syariat. Konflik yang muncul antara kaum Padri dan elite adat Minangkabau pada awalnya bersifat internal, namun berubah menjadi konflik kolonial ketika Belanda masuk dan memberi dukungan militer kepada pihak adat. Sejak saat itu, perlawanan Padri terhadap Belanda memperoleh makna keagamaan sebagai jihad melawan kekuasaan asing non-Muslim.[129]

Dalam laporan-laporan kolonial, keterlibatan Padri dalam serangan terhadap pos-pos Belanda di Tiku, Ayer Bangis, Natal, dan Tapanuli sering dipadukan dengan aktivitas perompakan Aceh di laut. Pengepungan benteng Ayer Bangis, pemblokiran sungai oleh praau-praau Aceh, serta serangan terhadap jalur perdagangan dipresentasikan sebagai bukti bahwa perlawanan Islam bersifat liar dan destruktif.[3] Namun, dari sudut pandang masyarakat lokal, tindakan tersebut justru diarahkan pada pusat-pusat ekonomi dan logistik kolonial, sehingga memiliki tujuan strategis yang jelas: memutus suplai, melemahkan pos Belanda, dan menguasai kembali jalur distribusi perdagangan. Dengan demikian, jihad dan perompakan tidak terpisah, melainkan menyatu sebagai bentuk perang maritim dan darat melawan kolonialisme.[130]

Jaringan maritim Aceh memainkan peran kunci dalam menghubungkan dimensi keagamaan dan ekonomi ini. Aceh pada masa itu bukan hanya sebuah

[129] . *Op Cit.* Christine Dobbin, hlm. 109–145.
[130] . pengepungan Ayer Bangis Sumatra's Westkust, 1829–1832.

kerajaan, tetapi juga simbol otoritas Islam di kawasan barat Sumatra dan Selat Malaka. Dengan mendukung atau menoleransi pelaut-pelaut Aceh yang membantu Padri, kekuasaan Aceh memperluas pengaruhnya atas perdagangan lada, budak, dan komoditas pesisir.[131] Aktivitas yang oleh Belanda disebut "pembajakan" sesungguhnya berfungsi sebagai mekanisme penguasaan sumber daya dan sebagai instrumen tekanan politik terhadap kekuasaan kolonial.

Cara Belanda membaca situasi ini sangat dipengaruhi oleh logika orientalisme. Dalam wacana kolonial, kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor Muslim hampir selalu dikategorikan sebagai fanatisme dan kebiadaban, sedangkan kekerasan negara kolonial dianggap sebagai tindakan rasional demi ketertiban. Edward Said menunjukkan bahwa orientalisme bekerja dengan mengubah konflik struktural menjadi sifat bawaan "Timur" yang dianggap irasional dan berbahaya.[132] Dalam konteks Pantai Barat Sumatra, pelaut Aceh dan Padri direduksi menjadi "perompak fanatik", bukan aktor politik-religius yang sedang mempertahankan kedaulatan ekonomi dan simbolik mereka.[133]

Dengan demikian, faktor sosial-keagamaan dalam munculnya aktivitas bajak laut bukanlah penyebab yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari konfigurasi konflik yang lebih luas. Jihad menyediakan bahasa ideologis, solidaritas Islam membentuk jaringan sosial, dan dunia maritim memberi ruang operasional bagi perlawanan. Sementara itu, narasi kolonial yang menyebut semua ini sebagai fanatisme berfungsi untuk menutupi kenyataan bahwa bajak

[131] .Anthony Reid, The Contest for North Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 45–78.
[132] . Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1978), hlm. 2–28.
[133] . *Ibid. 19-27*

laut di Pantai Barat Sumatra adalah aktor historis dalam konflik antara kekuasaan kolonial dan masyarakat Islam pesisir.

B. STRATEGI PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DALAM MENGHADAPI BAJAK LAUT DI PANTAI BARAT

Aktivitas bajak laut yang berkembang di Pantai Barat Sumatra sepanjang paruh pertama abad ke-19 menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah kolonial Belanda. Gangguan terhadap jalur pelayaran, perdagangan lada, serta keamanan pos-pos kolonial menyebabkan pemerintah Hindia Belanda harus menyusun berbagai strategi untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Strategi yang diterapkan tidak hanya berupa tindakan militer, tetapi juga mencakup pendekatan diplomatik, penguatan jaringan politik lokal, serta peningkatan pengawasan maritim. Berbagai kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan bajak laut dipandang bukan sekadar tindak kriminal, melainkan juga sebagai persoalan politik dan keamanan kolonial yang berkaitan dengan hubungan Belanda dengan Kesultanan Aceh dan penguasa-penguasa lokal di pesisir barat Sumatra.[134]

a) Penguatan Pos Militer dan Pertahanan Pesisir

Penguatan pos-pos militer menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Pantai Barat Sumatra. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya

[134] . Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 48-52.

ancaman keamanan yang berasal dari kelompok Padri, perompak Aceh, serta berbagai kelompok lokal yang menentang kekuasaan kolonial. Dalam situasi tersebut, pemerintah kolonial berupaya memperkuat kehadiran militernya di wilayah-wilayah strategis guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjamin kelancaran perdagangan dan komunikasi antarpelabuhan.[135]

Ketika situasi keamanan di wilayah Priaman memburuk pada akhir 1830, pemerintah kolonial mengerahkan berbagai unsur kekuatan militer untuk mempertahankan daerah tersebut. Dalam salah satu operasi, korvet Pollux yang berlabuh di perairan setempat menurunkan sekitar lima puluh marinir dan pelaut untuk membantu operasi darat. Pasukan tersebut dipimpin oleh Letnan Dua Angkatan Laut Van den Broek yang gugur ketika memimpin penyerbuan terhadap posisi lawan. Keterlibatan unsur angkatan laut dalam operasi darat menunjukkan bahwa pemerintah kolonial memanfaatkan seluruh sumber daya militer yang tersedia untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang dianggap penting bagi keberlangsungan kekuasaan Belanda di Pantai Barat Sumatra.[136]

Memburuknya kondisi keamanan di wilayah pesisir utara semakin mendorong pemerintah kolonial memperkuat sistem pertahanan pantai. Aktivitas perompak Aceh di perairan Tapanuli dan Air Bangis menyebabkan jalur pelayaran menjadi tidak aman sehingga mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah kolonial menempatkan garnisun pada

[135]. Ridder de Stuers, De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra, Amsterdam: Van Kampen, 1849, hlm. 93–110.

[136] H.M. Lange, *Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra* (1819–1845), ’s-Hertogenbosch: Gebroeders Muller, 1852, hlm. 142–147; berisi uraian operasi di Priaman akhir 1830, keterlibatan korvet Pollux, serta peristiwa gugurnya Letnan Dua Van den Broek.

sejumlah titik strategis, memperkuat benteng-benteng yang telah ada, serta meningkatkan pengawasan terhadap jalur pelayaran yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan di Pantai Barat Sumatra. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pengaruh kelompok perompak dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi kolonial.[137]

Upaya penguatan pertahanan pesisir semakin terlihat ketika wilayah Natal kembali diserang oleh kelompok perompak yang dipimpin Sidi Mara dari arah laut. Dalam menghadapi ancaman tersebut, pemerintah kolonial segera mengirim bantuan militer dari Padang di bawah pimpinan Kapten Artileri Helwig. Bantuan tersebut diperkuat oleh armada Anakoda Laikap yang kembali berhasil memukul mundur kelompok perompak. Kehadiran pasukan bantuan dan armada lokal tersebut memungkinkan benteng yang terkepung dapat dipertahankan serta memaksa pasukan penyerang untuk mundur. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pertahanan pesisir Belanda tidak hanya bertumpu pada garnisun yang ditempatkan di wilayah strategis, tetapi juga didukung oleh kemampuan mengirim bantuan secara cepat dari pusat-pusat militer kolonial ketika terjadi ancaman terhadap pos-pos pertahanan di pesisir.[138]

Dengan demikian, penguatan pos militer dan pertahanan pesisir menjadi salah satu strategi utama pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi ancaman bajak laut di Pantai Barat Sumatra. Strategi tersebut diwujudkan melalui penempatan garnisun pada daerah-daerah strategis, pemanfaatan kapal perang untuk mendukung operasi militer, pengiriman bantuan pasukan ke wilayah yang

[137]. *Op Cit. Gusti Asnan. Hlm. 172*
[138]. Op cit jargag.

terancam, serta kerja sama dengan kekuatan maritim lokal. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah kolonial berupaya mengamankan jalur pelayaran, melindungi pusat-pusat perdagangan, dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan Pantai Barat Sumatra.

b) Operasi Militer dan Pengamanan Jalur Perdagangan

Selain memperkuat pos-pos pertahanan, pemerintah kolonial Belanda juga melaksanakan berbagai operasi militer untuk mengamankan jalur perdagangan darat dan laut di Pantai Barat Sumatra. Langkah ini dilakukan karena aktivitas kelompok Padri dan perompak Aceh tidak hanya mengancam keamanan wilayah kolonial, tetapi juga mengganggu kelancaran perdagangan yang menjadi salah satu kepentingan utama pemerintah kolonial.

Pada Januari 1831, sekitar tujuh puluh empat penghulu bersama hulubalang, desertir, budak yang melarikan diri, dan kelompok yang dalam arsip kolonial disebut sebagai struikroovers (perampok darat) melakukan serangan di kawasan Limau Manis dan Lubuk Kilangan, tidak jauh dari Padang. Mereka menyerang rumah penyewa monopoli candu serta membakar fasilitas ekonomi milik Van den Berg & Co. Situasi tersebut mendorong Residen bersama komandan militer mengerahkan sekitar seratus serdadu untuk memukul mundur para penyerang. Meskipun operasi tersebut berhasil mengamankan wilayah Padang,[139] peristiwa itu menunjukkan bahwa pusat perdagangan kolonial masih rentan terhadap gangguan keamanan.

[139] Christine Dobbin, *Kebangkitan Ekonomi Islam di Tengah Perubahan Politik: Minangkabau 1784-1847* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 210-212.

Pada saat yang sama, pemerintah kolonial menghadapi ancaman yang lebih serius di wilayah pesisir utara. Menurut laporan kolonial, perairan Tapanuli dan Air Bangis menjadi tidak aman akibat aktivitas perompak Aceh (Atjinsche zeeroovers), sehingga para pedagang enggan berlayar ke kawasan tersebut. Di sisi lain, kelompok Padri dari Bonjol dan Alahan Panjang menguasai sebagian wilayah pesisir antara Tiku hingga Air Bangis serta memperluas pengaruhnya ke pedalaman Batak dan Tapanuli. Kondisi ini mengganggu jalur komunikasi dan perdagangan yang menghubungkan berbagai pos kolonial di Pantai Barat Sumatra.[140]

Ancaman tersebut mencapai puncaknya ketika kelompok Padri bersama perompak Aceh mengepung benteng Belanda di Air Bangis. Mereka membakar kampung-kampung di sekitarnya serta memblokade alur sungai dengan perahu-perahu bersenjata. Blokade ini menyebabkan terganggunya distribusi logistik dan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah kolonial berupaya mempertahankan pos pertahanannya sembari menunggu bantuan militer.[141]

Untuk mematahkan pengepungan tersebut, Belanda memperoleh dukungan dari Anakoda Laikap, seorang saudagar Bugis yang bermukim di Padang dan memiliki armada perahu bersenjata. Bersama pasukannya, ia menyerang armada perompak Aceh yang melakukan blokade dan berhasil memukul mundur mereka. Keberhasilan ini memaksa kelompok pengepung

[140] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 255-258

[141]. Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1930-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 45-48.

menghentikan serangan dan meninggalkan wilayah Air Bangis. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa operasi militer kolonial tidak hanya mengandalkan kekuatan tentara reguler, tetapi juga melibatkan kelompok maritim lokal yang memiliki kepentingan terhadap keamanan perdagangan.[142]

Ancaman terhadap jalur perdagangan belum berakhir setelah pengepungan Air Bangis dipatahkan. Tidak lama kemudian, wilayah Natal kembali diserang oleh pasukan Padri dari daratan dan armada perompak yang dipimpin Sidi Mara dari arah laut. Untuk mengatasi serangan tersebut, pemerintah kolonial segera mengirim bantuan militer dari Padang di bawah pimpinan Kapten Artileri Helwig. Bersama armada Anakoda Laikap, pasukan tersebut berhasil membebaskan benteng yang terkepung dan memukul mundur para penyerang.[143]

Berbagai operasi militer tersebut menunjukkan bahwa pengamanan jalur perdagangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kolonial di Pantai Barat Sumatra. Melalui pengerahan pasukan, pengiriman bantuan ke wilayah yang terancam, serta kerja sama dengan kekuatan maritim lokal, Belanda berupaya menjaga keamanan pelayaran dan komunikasi antarpelabuhan. Dengan demikian, operasi militer tidak hanya bertujuan mempertahankan wilayah kekuasaan kolonial, tetapi juga menjamin kelangsungan aktivitas perdagangan yang menjadi dasar kepentingan ekonomi Belanda di kawasan tersebut.

c) Diplomasi dan Perjanjian dengan Penguasa Lokal

[142] J. Breman, De Padri-Oorlog, hlm. 105-108. Arsip kolonial terkait kerjasama ini dapat ditemukan dalam Brieven van den Gouverneur der Westkust aan den Gouverneur-Generaal

[143] Howard Dick dkk., *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002), hlm. 55

pemerintah kolonial Belanda juga menempuh jalur diplomasi dalam upaya mengatasi perompakan di perairan Pantai Barat Sumatra. Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aktivitas bajak laut tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok perompak di laut, tetapi juga berkaitan dengan jaringan politik dan ekonomi yang melibatkan penguasa-penguasa lokal di kawasan pesisir.[144]

Dalam konteks tersebut, Belanda berupaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan Kesultanan Aceh sebagai salah satu kekuatan politik penting di kawasan utara Sumatra. Melalui serangkaian perundingan yang berlangsung pada pertengahan abad ke-19, kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan mengenai keamanan pelayaran dan perdagangan di wilayah perairan yang sering menjadi lokasi aktivitas perompakan.

Upaya tersebut menghasilkan Traktat Aceh tahun 1857 yang memuat sejumlah ketentuan mengenai kerja sama antara pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Aceh. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah komitmen kedua pihak untuk menindak berbagai bentuk kejahatan maritim, termasuk pembajakan laut (*zeeroof*), perampokan di wilayah pantai (strandroof), dan perdagangan budak (*menschenroof*). Melalui kesepakatan tersebut, Belanda berharap dapat mengurangi dukungan yang diterima kelompok-kelompok perompak dari wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Aceh.[145]

[144] . H. I. J. L. RIDDER DE STUERS, Her Werk van den Luitenant-Klonel Lange, NERLANDSCH . LEGER TER WESTKUST VAN SUMATRA."ZALT-BOMMEL, JOH. NOMAN en ZOON. 1853.

[145] H. I. J. L. RIDDER DE STUERS, Her Werk van den Luitenant-Klonel Lange, NERLANDSCH . LEGER TER WESTKUST VAN SUMATRA."ZALT-BOMMEL, JOH. NOMAN en ZOON. 1853.

Bagi pemerintah kolonial, perjanjian tersebut memiliki arti strategis karena memberikan dasar politik bagi pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan Pantai Barat Sumatra. Selain itu, kerja sama dengan penguasa lokal dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk menciptakan stabilitas keamanan dibandingkan hanya mengandalkan operasi militer semata.[146]

Dengan demikian, diplomasi menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi Belanda menghadapi ancaman bajak laut di Pantai Barat Sumatra. Melalui perjanjian dengan penguasa lokal, pemerintah kolonial berupaya membangun dukungan politik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap jalur-jalur perdagangan yang selama ini rentan terhadap aktivitas perompakan.

Berdasarkan pembahasan pada bab ini, dapat diketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi ancaman bajak laut dan menjaga stabilitas keamanan di Pantai Barat Sumatra. Strategi tersebut tidak hanya dilakukan melalui penggunaan kekuatan militer, tetapi juga melalui pengawasan jalur perdagangan dan pendekatan diplomatik dengan penguasa lokal. Beragam kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perompakan dipandang sebagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan wilayah, pelayaran, serta kepentingan ekonomi kolonial di kawasan tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan Belanda adalah memperkuat pos-pos militer dan pertahanan pesisir di berbagai wilayah strategis. Penguatan garnisun,

[146] H. I. J. L. RIDDER DE STUERS, Her Werk van den Luitenant-Klonel Lange, NERLANDSCH . LEGER TER WESTKUST VAN SUMATRA."ZALT-BOMMEL, JOH. NOMAN en ZOON. 1853.

penempatan pasukan tambahan, serta pembangunan sistem pertahanan di kawasan pantai dilakukan untuk mencegah serangan kelompok perompak maupun kelompok-kelompok lain yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Keberadaan benteng dan pos militer tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertahanan, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan perdagangan di wilayah pesisir.

Selain memperkuat pertahanan, Belanda juga melaksanakan berbagai operasi militer untuk mengamankan jalur perdagangan darat dan laut. Operasi-operasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok Padri dan perompak Aceh di sejumlah wilayah seperti Padang, Air Bangis, dan Natal. Melalui pengerahan pasukan, pengiriman bantuan militer, serta kerja sama dengan kelompok maritim lokal, pemerintah kolonial berupaya memastikan bahwa jalur distribusi barang dan komunikasi antarpelabuhan tetap dapat berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan perdagangan merupakan salah satu kepentingan utama yang ingin dipertahankan oleh Belanda.

Strategi berikutnya adalah pengawasan jalur maritim dan pemutusan jaringan logistik yang mendukung aktivitas perompakan. Pemerintah kolonial menyadari bahwa keberlangsungan kelompok-kelompok perompak tidak terlepas dari dukungan jaringan perdagangan, penyelundupan, dan bantuan dari sejumlah penguasa lokal. Oleh karena itu, Belanda berupaya mengawasi pelabuhan-pelabuhan penting, mengendalikan arus perdagangan, serta membatasi akses kelompok perompak terhadap senjata, amunisi, dan berbagai kebutuhan logistik

lainnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemberantasan perompakan tidak hanya dilakukan melalui konfrontasi militer, tetapi juga melalui pengendalian sumber daya yang menopang aktivitas mereka.

Di samping pendekatan militer dan pengawasan ekonomi, Belanda juga menggunakan jalur diplomasi untuk memperkuat keamanan kawasan. Melalui perjanjian-perjanjian dengan penguasa lokal, termasuk Kesultanan Aceh, pemerintah kolonial berusaha memperoleh dukungan politik dalam upaya menekan aktivitas perompakan. Traktat Aceh tahun 1857 menjadi salah satu contoh bagaimana Belanda memanfaatkan diplomasi untuk membangun kerja sama dalam menjaga keamanan pelayaran dan perdagangan. Melalui pendekatan ini, Belanda berupaya mengurangi dukungan terhadap kelompok-kelompok perompak sekaligus memperluas pengaruhnya di kawasan Pantai Barat Sumatra.

Dengan demikian, strategi Belanda dalam menghadapi bajak laut di Pantai Barat Sumatra merupakan kombinasi antara penguatan pertahanan militer, operasi pengamanan jalur perdagangan, pengawasan jaringan maritim, dan diplomasi dengan penguasa lokal. Keempat strategi tersebut saling melengkapi dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan yang mendukung kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Melalui kebijakan tersebut, Belanda tidak hanya berusaha menekan aktivitas perompakan, tetapi juga memperkuat kontrolnya atas wilayah pesisir dan jalur perdagangan yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan kekuasaan kolonial di Sumatra Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa istilah "bajak laut" yang digunakan dalam arsip-arsip kolonial Belanda tidak selalu merujuk pada kelompok kriminal murni yang melakukan perompakan di laut. Dalam banyak kasus, label tersebut juga diberikan kepada kelompok-kelompok lokal yang menentang dominasi politik dan ekonomi kolonial Belanda di Pantai Barat

Sumatra. Akibatnya, batas antara tindakan perlawanan terhadap kolonialisme dan aktivitas perompakan sering kali menjadi kabur dalam narasi kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda memandang kelompok-kelompok tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan pelayaran, perdagangan, dan stabilitas kekuasaannya. Oleh karena itu, Belanda menerapkan berbagai strategi untuk menekan aktivitas mereka, mulai dari penguatan pos-pos militer dan pertahanan pesisir, pelaksanaan operasi militer di wilayah-wilayah strategis, pengawasan jalur maritim dan jaringan perdagangan, hingga diplomasi dengan penguasa-penguasa lokal. Berbagai kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kontrol kolonial atas wilayah pesisir dan jalur perdagangan di Pantai Barat Sumatra.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena yang oleh pemerintah kolonial disebut sebagai pembajakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal. Sebagian kelompok yang dicap sebagai bajak laut memiliki hubungan dengan jaringan perlawanan lokal yang muncul akibat tekanan politik, ekonomi, dan militer kolonial. Dengan demikian, penyebutan "bajak laut" dalam sumber-sumber Belanda perlu dikaji secara kritis karena mengandung sudut pandang kolonial yang cenderung menempatkan setiap bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Belanda sebagai tindakan kriminal atau ancaman keamanan.

Oleh sebab itu, sejarah bajak laut di Pantai Barat Sumatra tidak hanya mencerminkan persoalan keamanan maritim, tetapi juga menggambarkan dinamika perlawanan masyarakat lokal terhadap proses perluasan kekuasaan kolonial Belanda pada abad ke-19. Dalam konteks ini, istilah "bajak laut" dapat

dipahami bukan sekadar sebagai identitas pelaku kejahatan laut, melainkan sebagai konstruksi kolonial yang dalam beberapa kasus digunakan untuk melegitimasi tindakan militer dan penguatan kontrol Belanda atas wilayah pesisir Sumatra.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai strategi. Pertama, memperkuat pos-pos militer dan pertahanan pesisir melalui penempatan garnisun, pembangunan benteng, serta pengiriman pasukan ke wilayah-wilayah strategis. Kedua, melaksanakan operasi militer untuk mengamankan jalur perdagangan darat dan laut yang sering mengalami gangguan akibat serangan kelompok yang dianggap sebagai perompak. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap jalur maritim dan berupaya memutus jaringan logistik yang mendukung aktivitas perlawanan di wilayah pesisir. Keempat, menempuh jalur diplomasi melalui perjanjian dan kerja sama dengan penguasa lokal, termasuk Kesultanan Aceh, guna memperkuat keamanan pelayaran dan perdagangan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa kebijakan Belanda terhadap bajak laut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengonsolidasikan kekuasaan kolonial di Pantai Barat Sumatra. Pemberantasan pembajakan bukan hanya bertujuan menciptakan keamanan pelayaran, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas kontrol politik, ekonomi, dan militer atas wilayah pesisir serta jalur perdagangan yang strategis. Dengan demikian, istilah bajak laut dalam konteks Pantai Barat Sumatra abad ke-19 tidak selalu merujuk pada pelaku kejahatan laut semata, melainkan juga dapat

mencerminkan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap dominasi kolonial Belanda.

Oleh karena itu, sejarah bajak laut di Pantai Barat Sumatra perlu dipahami tidak hanya sebagai sejarah kriminalitas maritim, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika hubungan antara kekuasaan kolonial dan masyarakat lokal dalam memperebutkan kontrol atas ruang, perdagangan, dan kekuasaan di kawasan pesisir Sumatra.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. Islam, Sejarah, dan Perubahan Sosial di Minangkabau.

Alfian, Ibrahim. Perang Rakyat Aceh. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Andaya, Leonard. "Hubungan Belanda-Aceh dan Traktat 1857." Jurnal Sejarah dan Budaya Maritim, Jilid 12, No. 1, 1999.

Asnan, Gusti. Citra dan Identitas Kota Padang dalam Lintasan Sejarahnya.

Asnan, Gusti. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Asnan, Gusti. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1930-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Jakarta: Kencana, 2006.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Bleeker, F.

Boer, P. De. Geschiedenis van Atjeh. Jilid II. Batavia: Percetakan Pemerintah, 1918.

Breman, J. De Padri-Oorlog.

Budiawan. "Bajak Laut di Asia Tenggara Abad 16–19: Evolusi dan Pola-polanya." Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 13, No. 1, 2025.

Chaudhuri, K.N. Trade and Civilisation in the Indian Ocean. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Christine Dobbin. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784–1847.

Dobbin, Christine. Kebangkitan Ekonomi Islam di Tengah Perubahan Politik: Minangkabau 1784–1847. Jakarta: LP3ES, 1992.

Dick, Howard, dkk. The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000. Honolulu: University of Hawaii Press, 2002.

Ekaputra, Rinaldi. "Hubungan Pantai Barat dengan Daerah Pedalaman." Makalah Seminar Pantai Barat Sumatra dalam Perspektif Sejarah. BKSNT Padang, 20 Mei 2003.

Efrianto, N. “Jejak Peradaban Masa Lalu di Kota Pariaman.” Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 2, No. 1, 2025.

Francis, E. Herinneringen uit den Levensloop van een Indisch Ambtenaar van 1815 tot 1851. Jilid III. Batavia: H.M. van Dorp, 1856.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Terj. Richard Philcox. New York: Grove Press, 2004.

Graves, Elizabeth E. The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century. Ithaca: Cornell University Press, 1981.

Hoffman, F.G. Verhaal der Expeditie van 1857.

Hurgronje, C. Snouck. Orang-Orang Aceh. Jilid I. Terj. A. Hassan. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Irwin, Graham. Nineteenth Century Borneo: A Study in Diplomatic Rivalry. VKI 15, 1955.

Jargang, Twedee. Nederland Indie. Batavia, 1839.

Jargang, Twedee. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij, 1830.

Jargang. De Gids. 1887.

Kartodirdjo, Sartono, dkk. Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839–1848. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973.

Kielstra, E.B. Atjeh en de Verhouding tot Nederland van 1819–1824 en 1831–1873. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (BKI), Deel 43, 1894.

Kielstra, E.B. Sumatra Westkust.

Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Lange, H.M. Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra (1819–1845). ’s-Hertogenbosch: Gebroeders Muller, 1852.

Langen, K.F.H. van. De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur. Batavia: Landsdrukkerij, 1888.

Maksum, M. Ali. Laut, Bajak, dan Kuasa: Sejarah Maritim Pantai Barat Sumatra Abad ke-19. Yogyakarta: Ombak dan IKOSI, 2014.

Mansoer, M.D., dkk. Sedjarah Minangkabau. Jakarta: Bhratara, 1970.

Maxwell, W.G., dan W.S. Gibson. Treaties and Engagements the Malay States and Borneo. London, 1924.

Mohammad Said. Aceh Sepanjang Abad. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Mulyanto, Heru. “Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut: Teori Adrian Bernard Lapian dalam Pola Masyarakat Maritim Kerajaan Sriwijaya.” Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, Vol. 15, No. 1, 2025.

Mutika Zed. Saudagar Pariaman: Menerjang Ombak Membangun Maskapai. Jakarta: LP3ES.

Osthoff, H.L. Beschrijving van het Vaarwater Langs de Westkust van Sumatra. Batavia: Landsdrukkerij, 1840.

Osthoff, H.L. Schets Kaart der Westkust van Sumatra van Taboejong.

Reid, Anthony. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680, Volume I: Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Reid, Anthony. Histories of Sumatra. Singapore: NUS Press, 2005.

Reid, Anthony. The Contest for North Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.

Reid, Anthony. Asal Mula Konflik Aceh. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Ridder de Stuers, H.J.J.L. De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849.

Ridder de Stuers, H.I.J.L. Her Werk van den Luitenant-Kolonel Lange, Nederlandsch Leger ter Westkust van Sumatra. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1853.

Ritter, W.L. “Catatan Singkat tentang Kerajaan Aceh.” Jurnal Hindia Belanda, Vol. 1, Bagian 2.

Schrieke, B.J.O. De Betrekkingen tusschen Nederland en Atjeh van 1824 tot 1873. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919.

Sinar, Tengku Luckman. Kesultanan Deli Dalam Sejarah 1632–1946. Medan: Yayasan Kesultanan Deli, 1999.

Siti Aisyah. “Dinamika Perekonomian Masyarakat Minangkabau: Peluang dan Tantangan Perdagangan di Daerah Rantau Pariaman Abad XIX.” Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 10, No. 2, 2020.

Sudirman. Bandara Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500–1873. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Stapel, F.W. Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Vol. 3. Amsterdam: Elsevier, 1938.

Stoler, Ann Laura. Colonial Archives and the Arts of Governance. Archival Science, Vol. 2, 2002.

Stoler, Ann Laura. Race and the Education of Desire. Durham: Duke University Press, 1995.

Sulistiyono, Singgih Tri. Historiografi Maritim Indonesia: Prospek dan Tantangannya.

Verbeek, Reinier D. De Zilver en Goudmijnen van Salida.

Vlekke, Bernard H.M. Nusantara: A History of Indonesia. The Hague: W. Van Hoeve, 1965.

Waluyo, Harry. Pengungkapan dan Pengkajian Naskah Kuno Kota Pariaman. Jakarta: Depdikbud, 1996/1997.